

**ANALISIS PENGARUH DEFISIT ANGGARAN,
UANG BEREDAR DAN PDB TERHADAP
TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PERIODE
2001.1 – 2013.4**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

IKA ROTUA SINAGA

NIM. 12020110120039

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ika Rotua Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120039
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DEFISIT ANGGARAN,
UANG BEREDAR DAN PDB TERHADAP
TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PERIODE
2001.1-2013.4**
Dosen Pembimbing : Wahyu Widodo, S.E, M.Si, Ph.D.

Semarang, 05 Januari 2015

Dosen Pembimbing



Wahyu Widodo, S.E, M.Si, Ph.D

NIP. 197310182002121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ika Rotua Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120039
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DEFISIT ANGGARAN,
UANG BEREDAR DAN PDB TERHADAP
TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PERIODE
2001.1-2013.4**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Januari 2015

Tim Penguji

1. Wahyu Widodo, SE, M.Si, Ph.D (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, M.Si (.....)
3. Firmansyah, SE, M.Si, Ph.D (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I



Anis Charin, SE, M.Com, Ph.D, Akt.

NIP.196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ika Rotua Sinaga, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ”Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Uang Beredar dan PDB Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2001.1 – 2013.4”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 05 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

(Ika Rotua Sinaga)

NIM : 12020110120039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Bersujud Kumengucap Syukur
Atas Kasih yang Tuhan Limpahkan
Dengan Perantara Kedua Orangtuaku
Yang Amat Sangat Kucintai**

**Sejuta Terima Kasih
Tidaklah Cukup Untuk Diungkapkan
Atas Cinta dan Kasih Sayang
Untukku Anakmu**

**Engkau Selalu Membimbingku
Selama dalam Studiku
Engkau Rela Berkorban
Demi Masa Depan Anak-Anakmu**

**Dengan Bercucur Keringat
Engkau Mencari Biaya Kuliahku
Terima Kasih Bapak, Terima Kasih Ibu
Aku Bangga Padamu**

**Tak Semudah Berbalik Badan
Untuk Membalas Jasamu selama Hidupku
Tiada Untaian Kata yang Paling Indah
Yang dapat Kuucapkan selain Doa**

**Dan Rasa Terima Kasihku untuk Bapak dan Ibuku
Semoga Tuhan Memberkatimu
Terimalah Ini sebagai Tanda Bakti dan Kasihku
Atas Jerih Payahmu selama Ini**

**Hanya Ini yang Bisa Aku Berikan Serta Doa Agar
Bapak/Ibu Diberi Kesehatan dan Umur Panjang
Kupersembahkan Kepada yang Tercinta :**

**Kedua Orangtuaku (Rismon Sinaga dan Suriati Sianipar)
Serta Kedua Kakakku dan Adikku
Juga Sahabat-sahabatku..**

ABSTRACT

Inflation rate is one of the main indicators of a country's macroeconomic performance. Therefore, inflation rate must be managed at low level and in a stable condition. High inflation can stimulate the deterioration of income distribution, increasing poverty rate, reducing domestic saving and generating current account deficit. The rate of inflation is affected by the government fiscal and monetary policy, and other relevant economic factors unrelated with both government policies. This research aims to analyze the effect of budget deficit, money supply and gross domestic product (GDP) upon inflation rate in Indonesia from 2001 to 2013. This research uses Vector Error Correction Model (VECM) approach. Meanwhile, Impulse Response Function (IRF) is used to trace the response of a variable upon the shock within the estimation model, while Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) is used to disclose the relation path between variables within a system. The results of estimation show that in the long-run, budget deficit and GDP have positive and significance influence upon inflation rate, however money supply has negative and significant to inflation rate. Furthermore, in the short-run money supply and GDP positively and significantly influence the inflation rate, while budget deficit has no significant effect upon inflation rate.

Keywords: Inflation, Budget Deficit, Money Supply, GDP, VECM

ABSTRAK

Inflasi adalah salah satu indikator utama kinerja makro ekonomi suatu negara. Untuk itu, tingkat inflasi harus dipertahankan pada level rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik dan menyebabkan defisit transaksi berjalan. Perkembangan inflasi dipengaruhi baik oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh oleh pemerintah dan faktor-faktor lain diluar dua kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh defisit anggaran, jumlah uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)*. Sementara itu, *Impulse Response Function (IRF)* digunakan untuk menelusuri respon suatu variabel terhadap shock yang ada dalam model estimasi, sedangkan *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)* digunakan untuk mengungkapkan pola hubungan variabel yang ada dalam suatu sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, defisit anggaran dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, dalam jangka pendek uang beredar dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan defisit anggaran berpengaruh tidak signifikan.

Kata Kunci: Inflasi, Defisit Anggaran, Jumlah Uang Beredar, PDB, VECM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Uang Beredar Dan PDB Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2001.1—2013.4”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Moh. Nasir. Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Wahyu Widodo, S.E., M.Si, Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan, kesabaran dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph.D., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh studi di Universitas Diponegoro.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Kedua orangtuaku yang sangat kukasihi, Bapak (Rismon Sinaga) dan Ibuku (Suriati Sianipar), yang selalu tak henti memberikan doa, nasehat, motivasi, kasih sayang yang tak ternilai harganya.
6. Kakakku tersayang Susi Astusi Sinaga dan Abangku tercinta Robby Sinaga. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan sudah menjadi sosok teladan yang baik buat adik-adikmu.
7. Kedua adikku tersayang Octa Sarina Sinaga dan Kelly Nehemia Andriani Sinaga, atas doa dan support yang selalu kalian berikan kepada penulis.
8. Terima kasih banyak buat keluarga besarku di Batam, Kotapinang, dan di Kisaran (Opung, Tante, Uda, Tulang, para Sepupu, dan Uwak Ijen) buat doa, motivasi dan nasehat yang selalu kalian berikan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat *GG Bias*: Anggraeni Aza, Devy Nurita, Diah Ayu, Dwi Rahmayani, Rahmi Fuji Harahap, Riana Fauzia, Widayanti Mustikowati, terimakasih banyak atas persahabatan selama masa perkuliahan. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.
10. Reza Rosyda Umami, yang telah setia dari awal kuliah sampai lulus kuliah sudah bersedia mengantar dan menjemput penulis, tidak peduli panas maupun hujan melanda. Thanks mbak bro.
11. Teman-teman IESP'10 (Ayu Minos, Anas, Ana dini, Astri, Aang, Abil, Aditya Emka, Agil, Adri, Risky, Roni, Bram, Dian PS, Dian Pratiwi, Danu, Desi, Hani, Ian, Kinanti, Ghalib, Naomi, Nana, Rici, Mutia, Pipit

Agrelia, Pipit Bahari, Melia, Meiriza) dan yang lain yang tidak bisa penulis menyebutkan satu persatu.

12. Teman-teman kost di Perumda Tembalang Baru No. 34, geng ngapak (Kamil, Situr, Emmy), dek Riama Samosir, dek Retno, terimakasih buat semangat dan kebersamaan kita selama dikosan.
13. Sahabatku Etrick Wiranti beserta Bapak Rofik dan Ibu Endang di Pati. Terimakasih untuk kekeluargaan, kebaikan dan setiap semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Sahabat-sahabatku “*DISFY*” (Dessy Sembiring, Fernando Sirait, Slamet Sinaga, Yacob Nainggolan) untuk setiap semangat, motivasi, dan setiap moment yang pernah kita lewati bersama selama masa perkuliahan.
15. Terimakasih untuk keluarga alumni SMA RK BINTANG TIMUR di Semarang. Atas keuargaan dan kebersamaan selama ini.
16. Keluarga Tim I KKN UNDIP 2013, Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dan
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, guna menyempurnakan skripsi ini.

Semarang, 05 Januari 2015

Penulis

Ika Rotua Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan dan Kegunaan	15
1.3.1. Tujuan	15
1.3.2. Kegunaan.....	16
1.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Inflasi	18
2.1.2. Jenis Inflasi	19
2.1.3. Jenis Inflasi Menurut Asal Dari Inflasi.....	19
2.1.4. Penyebab Inflasi	21
2.1.5. Teori Inflasi	25
2.2. Kebijakan Fiskal	32
2.2.1 APBN dan Kebijakan Fiskal	34
2.2.2 Defisit Anggaran	40
2.2.3 Sebab-sebab Defisit Anggaran	45
2.2.4 Dampak Defisit Anggaran	50
2.2.5 Kontroversi Dampak Defisit Anggaran.....	52
2.2.5.1 Kelompok Ricardian (<i>Ricardian Equivalence</i>)	53
2.2.5.2 Kelompok Keynesian	55
2.2.5.3 Kelompok Neoklasik	57
2.3. Uang Beredar	59
2.3.1 Fungsi Uang.....	60
2.3.2 Teori Permintaan Uang dan Tingkat Harga.....	61
2.3.2.1 <i>Keynes Effect</i>	61
2.3.2.2 <i>Pigou Effect</i>	63
2.3.2.3 Bentuk Kurva Permintaan Agregat.....	67
2.4. Kebijakan Moneter	69
2.4.1 Defenisi Kebijakan Moneter	69
2.4.2 Instrumen Kebijakan Moneter	70

2.4.3 Keefektifan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter	73
2.4.3.1 Kebijakan Fiskal	75
2.4.3.2 Kebijakan Moneter.....	76
2.5. Hubungan antara Masing-masing Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	78
2.5.1 Hubungan Defisit anggaran dengan Tingkat Inflasi di Indonesia	78
2.5.2 Hubungan Uang Beredar dengan Tingkat Inflasi di Indonesia	79
2.5.3 Hubungan PDB dengan Tingkat Inflasi di Indonesia.....	82
2.6. Penelitian Terdahulu.....	83
2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis Kebijakan Fiskal.....	86
2.8. Hipotesis	88
BAB III METODE PENELITIAN.....	89
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	89
3.1.1 Variabel Penelitian	89
3.1.2 Defenisi Opersional	89
3.2. Jenis dan Sumber Data	90
3.3. Metode Pengumpulan Data	91
3.4. Metode Analisis.....	91
3.4.1 Proses Pengujian Analisis.....	91
3.4.2 Spesifikasi Model Penelitian	94
3.5. Analisis Data	97
3.5.1 Uji Stasioneritas	97
3.5.2 Penentuan Panjang Lag	100
3.5.3 Uji Kointegrasi	101
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	104
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	104
4.1.1. Perkembangan Tingkat Inflasi.....	104
4.1.2. Perkembangan Defisit Anggaran.....	107
4.1.3. Perkembangan Uang Beredar	111
4.1.4 Perkembangan PDB.....	114
4.2. Analisis Data	117
4.2.1. Deskripsi Statistik.....	117
4.2.2. Hasil Pengujian Stasioneritas	118
4.2.3. Penentuan Panjang Lag	120
4.2.4. Hasil Pengujian Kointegrasi	121
4.2.5. Hasil Pengujian VECM	122
4.2.6. Analisis <i>Innovation Accounting</i>	126
4.2.6.1 <i>Impulse Rensponse Function</i>	126
4.2.6.2 Hasil <i>Variance Decomption</i>	131
4.3. Interpretasi Hasil.....	135
4.3.1. Pengaruh Defisit anggaran Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia	135
4.3.2 Pengaruh Uang Beredar Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia	136
4.3.3 Pengaruh PDB Terhadap Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia.....	137
BAB V PENUTUP.....	139
5.1. Simpulan	139
5.2. Rekomendasi Kebijakan	141

5.3. Keterbatasan	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	149

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2001-2013	11
Tabel 1.2.	Perkembangan Jumlah Uang Beredar selama Periode 2001-2013.....	13
Tabel 2.1.	Jenis Inflasi.....	19
Tabel 2.2.	Ringkasan Metode Perhitungan Surplus/Defisit Anggaran	44
Tabel 2.3.	Penelitian terdahulu	84
Tabel 4.1.	Uji Statistik Deskripsi Masing-masing Variabel.....	118
Tabel 4.2.	Hasil Pengujian Stasioneritas Tingkat <i>Level</i>	119
Tabel 4.3.	Hasil Pengujian Stasioneritas Tingkat <i>First Difference</i>	119
Tabel 4.4.	Hasil Pengujian Stasioneritas Tingkat <i>Second Difference</i>	120
Tabel 4.5.	Penentuan Lag Optimal	121
Tabel 4.6.	Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen (<i>Trace Statistic</i>)	121
Tabel 4.7.	Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen (<i>Maximum Equivalence</i>)	122
Tabel 4.8.	Hasil Estimasi Model VECM.....	123
Tabel 4.9.	<i>Impulse Response</i> Inflasi	127
Tabel 4.10.	<i>Impulse Response</i> Defisit Anggaran	128
Tabel 4.11.	Hasil <i>Impulse Response</i> Uang Beredar	129
Tabel 4.12.	Hasil Pengujian <i>Impulse Response</i> PDB	130
Tabel 4.13.	Hasil Pengujian <i>Variance Decomposition</i>	131

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1.Determinan Inflasi di Indonesia	3
Gambar 2.1. <i>Inflationary Gap</i>	22
Gambar 2.2. <i>Demand Pull Inflation</i>	23
Gambar 2.3. <i>Cosh Push Inflation</i>	24
Gambar 2.4.Proses Terjadinya <i>Inflationary Gap</i>	30
Gambar 2.5.Inflasi Berhenti karena <i>Inflationary Gap</i> Mengecil	31
Gambar 2.6. <i>Crowding Out</i>	58
Gambar 2.7. <i>Keynes Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	62
Gambar 2.8. <i>Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	65
Gambar 2.9. <i>Keynes Effect, Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	66
Gambar 2.10.Bentuk Kurva Permintaan Agregatif : Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes	67
Gambar 2.11.Bentuk Kurva Permintaan Agregatif dengan Adanya Jerat Likuiditas	68
Gambar 2.12.Bentuk Standar Kurva L2 dan Kurva LM.....	75
Gambar 2.13.Kebijakan Fiskal.....	77
Gambar 2.14.Kebijakan Moneter.....	77
Gambar 2.15.Hubungan Antara <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> terhadap Uang dan Tingkat Harga.....	80
Gambar 2.16.Hubungan antar Variabel dalam Kerangka Pemikiran Teoritis	88
Gambar 3.1.Proses Pengujian VECM.....	92

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1.Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2001-2013 (Persen)	6
Grafik 4.1.Perkembangan Inflasi di Indonesia Periode 2001.1-2013.4 (Persen).....	105
Grafik 4.2.Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2001-2013 (Persen) ..	106
Grafik 4.3.Perkembangan Defisit Anggaran Selama Kurun Waktu 2001.1-2013.4 (Triliun Rupiah).....	108
Grafik 4.4.Perkembangan Defisit Anggaran Selama Kurun Waktu 2001-2013 (Triliun Rupiah).....	109
Grafik 4.5.Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia Periode 2001.1- 2013.4 (Triliun Rupiah)	112
Grafik 4.6. Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia Periode 2001- 2013 (Triliun Rupiah).....	113
Grafik 4.7. Perkembangan Pertumbuhan PDB Periode 2001.1-2013.4 (Persen).....	114
Grafik 4.8. Perkembangan Pertumbuhan PDB Periode 2001-2013 (Persen).....	115

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Penelitian.....	150
Lampiran B Uji Stasioneritas Pada Tingkat <i>Level</i>	152
Lampiran C Uji Stasioneritas Pada Tingkat <i>First Difference</i>	156
Lampiran D Uji Stasioneritas Pada Tingkat <i>Second Difference</i>	160
Lampiran E Uji Lag Optimal	157
Lampiran F Uji Kointegrasi	165
Lampiran G Hasil Estimasi VECM.....	168
Lampiran H Uji <i>Impulse Response Function</i>	170
Lampiran I Uji <i>Variance Decomotion</i>	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi adalah sebuah fenomena ekonomi yang tak pernah selesai untuk dibicarakan dalam sejarah panjang ekonomi. Inflasi menjadi bahasan yang krusial karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan, menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik (Susanti, 1995).

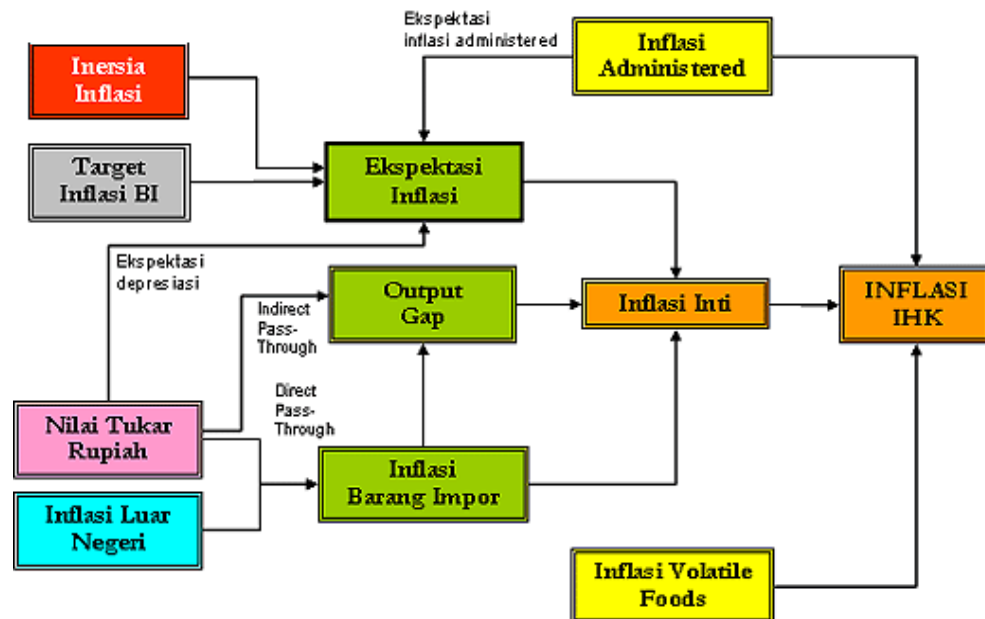
Sukirno (1994) menjelaskan bahwa inflasi di suatu negara adalah salah satu indikator perekonomian yang penting, karena itu laju perubahannya selalu diupayakan rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ‘penyakit’ dalam ekonomi makro yang pada akhirnya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi merupakan cerminan kecenderungan naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama kurun waktu tertentu. Dengan naiknya tingkat harga ini daya beli dari masyarakat akan menurun, dan akibatnya barang-barang hasil produksi tidak terserap oleh pasar secara maksimal dan akhirnya produsen pun tidak akan menambah besaran investasinya. Apabila besaran investasi berkurang, akan menyebabkan pendapatan nasional dan pertumbuhan

ekonomi menurun, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan aktivitas perekonomian nasional.

Meskipun demikian, inflasi bukanlah sesuatu hal yang harus dihindari atau dimusuhi suatu negara. Jika berada pada tingkat yang tepat, inflasi akan mampu meningkatkan gairah produksi dalam negeri. Naiknya harga pada kenaikan yang tepat menjadikan perputaran barang menjadi lebih cepat, dan keuntungan yang bertambah akan menaikkan tingkat produksi barang. Tingkat pengangguran akan berkurang dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi sehingga membuka kesempatan kerja. Pada akhirnya perlahan-lahan perekonomian akan bertumbuh ke arah yang positif (Sipayung dkk, 2013).

Berdasarkan teori, inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor fundamental, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Inflasi juga dipicu oleh perilaku konsumsi musiman masyarakat dan permasalahan struktural. Terkait dengan kerangka inflasi di Indonesia, Bank Indonesia yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan inflasi telah menggunakan kerangka determinan inflasi di Indonesia yang disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Determinan Inflasi di Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, 2014.

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, inflasi muncul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi negatif *supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan

pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya (Bank Indonesia, 2014).

Ekspektasi inflasi tersebut lebih cenderung bersifat *adaptif* atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi penawaran-permintaan tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan (Bank Indonesia, 2014).

Sementara itu, menurut Atmadja (1999), inflasi di Indonesia juga dapat dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika.

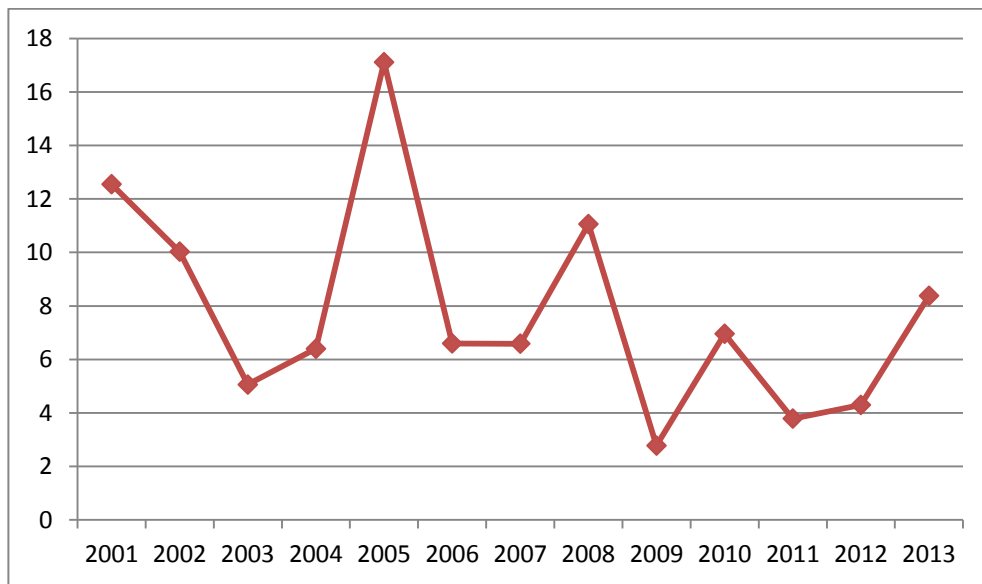
Dalam rangka mengantisipasi dan mengelola inflasi, pemerintah/otoritas moneter menggunakan beberapa pendekatan dan kebijakan. Dewasa ini, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi menggunakan konsep *inflation targetting framework* (ITF). ITF adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang

ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode tertentu. ITF secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Nugroho, 2012). ITF telah banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian "*single objective*"-nya (Langi dkk, 2014).

Pada Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi selama kurun waktu 2001 sampai 2013, mengalami fluktuasi yang beragam. Tekanan inflasi tertinggi terjadi pada periode 2001 sebesar 12,55 persen, dan kembali meningkat pada periode 2005 sebesar 17,11 persen kemudian bergerak turun pada periode 2006 sebesar 6,60 persen setelah itu naik kembali pada tahun 2008 yaitu sebesar 11,06 persen dikarenakan pada saat itu terjadi krisis global yang melanda dunia sehingga berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangannya setiap tahun inflasi terendah diperoleh pada periode 2009 yaitu sebesar 2,78 persen namun kemudian mengalami kenaikan pada periode 2010 yaitu sebesar 6,96 persen dan kemudian mengalami penurunan pada periode 2011 sebesar 3,79 persen hingga kemudian mengalami kenaikan pada periode 2013 sebesar 8,38 persen yang

menyebabkan persentase pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti kemudian berdampak pada naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

Grafik 1.1
Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2001-2013
(Persen)



Sumber : Badan Pusat statistik, 2014.

Dari penjelasan mengenai penyebab tingginya tingkat inflasi di Indonesia di atas, diketahui bahwa inflasi merupakan *outcome* dari interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Terjadinya ketimpangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat tentunya akan mempengaruhi inflasi. Sabirin (2002) menyatakan bahwa aspek moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia ternyata akan mempengaruhi permintaan agregat sementara penawaran agregat lebih banyak dipengaruhi oleh sektor ril seperti kondisi musim yang mempengaruhi produksi pertanian, distribusi barang dan sebagainya.

Meskipun penempatan inflasi sebagai sasaran akhir, tidak berarti Bank Indonesia mengabaikan sasaran makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Justru pengendalian inflasi tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja pada tingkat kapasitas penuh. Disamping itu, mengingat adanya *trade-off* jangka pendek antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, mentargetkan inflasi secara otomatis identik dengan mentargetkan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain, dalam menetapkan target inflasi, Bank Indonesia sudah mempertimbangkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai dengan tingkat inflasi tersebut (Ikasari, 2005).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat inflasi di Indonesia, antara lain melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen defisit anggaran. Kebijakan fiskal yang ekspansif bertujuan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran alokasi anggaran untuk mendorong perekonomian. Akan tetapi, kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif kalau tidak didukung oleh situasi atau kondisi yang tepat dan kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian, misalkan, stimulus fiskal yang semestinya akan meningkatkan permintaan agregat (*aggregate demand*), namun bila tidak diimbangi kebijakan moneter yang akomodatif, justru dapat menyebabkan hasil yang kontra produktif. Sebagaimana kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola dengan hati-hati maka akan timbul inflasi (Pramuji, 2008).

Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Pandangan ini diantaranya dikemukakan oleh *Say's Law* bahwa dalam kondisi *full employment*, setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta (*crowd-out*) dalam jumlah yang sama dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat (Surjaningsih dkk, 2012).

Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes dan sejak saat itu ekonom mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya dampak berganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran tersebut.

Selain dampak pengeluaran pemerintah terhadap output, aspek lain yang penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai *automatic stabilizer* perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan

pajak. Dengan demikian, *automatic stabilizer* kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi *countercyclical* dari kebijakan fiskal (Surjaningsih dkk, 2012).

Pada umumnya, negara berkembang dan maju mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat, melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat krisis global, dan pengeluaran berlebih karena inflasi. Kebijakan defisit anggaran merupakan kondisi dimana total pengeluaran pemerintah (belanja negara) lebih besar dari total penerimaan pemerintah (pendapatan negara ditambah hibah) (Mankiw, 2000).

Dasar teori pengeluaran pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan nasional, yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan suatu kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2001). Pengaruh kenaikan pengeluaran pemerintah dapat digambarkan dalam model yang dibangun oleh Keynes. Mankiw (2006) menyatakan

bahwa bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat.

Menurut Sukirno (2006) pada masa perekonomian yang berkembang pesat, kesempatan kerja yang tinggi dapat menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi pula dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Apabila masyarakat masih terus menambah pengeluarannya maka permintaan agregat akan kembali naik. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan PDB menjadi meningkat pula. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan inflasi yang lebih cepat.

Tabel 1.1 di bawah ini menjelaskan perkembangan defisit anggaran di Indonesia selama periode tahun 2001 sampai 2013.

Tabel 1.1
Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2001-2013

Tahun	Defisit anggaran (Miliar rupiah)	Defisit anggaran (% terhadap PDB)
2001	34.238,7	2,8
2002	530,5	1,5
2003	32.783,5	1,9
2004	11.741,5	1,3
2005	4.992,4	0,5
2006	30.485,2	0,9
2007	48.750,4	1,3
2008	1.748,3	0,08
2009	31.275,1	1,58
2010	88.575,3	0,73
2011	88.234,0	1,14
2012	189.397,0	1,86
2013	237.701,0	2,38

Sumber : Nota Keuangan, 2001-2013.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2001 persentase defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,8 persen dan terus menurun, tahun 2009 meningkat dan menurun lagi tahun 2010. Semenjak 2011 defisit anggaran terhadap PDB meningkat sampai 2,38 pada tahun 2013.

Menurut Pramuji (2008) tujuan kebijakan fiskal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang mengganggu stabilitas ekonomi makro. Defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Karena defisit anggaran yang dibiayai melalui penciptaan uang beredar dapat mengakibatkan pesatnya pertumbuhan jumlah uang beredar dan akhirnya mengakibatkan kenaikan laju inflasi.

Wahjuanto (2010) menjelaskan bahwa jika terjadi kenaikan uang beredar, maka akan menstimulus terjadinya kenaikan harga. Dengan demikian, laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi rendah. Selanjutnya pernyataan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter mengandung arti bahwa laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi (Dornbusch dan Fischer, 1997).

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh teori kuantitas uang Fisher. Dengan demikian, hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi memiliki sifat hubungan positif dimana jika ada peningkatan dalam jumlah uang beredar maka akan meningkatkan tingkat inflasi sebaliknya jika ada penurunan dalam jumlah uang beredar maka akan menurunkan tingkat inflasi (Langi dkk, 2014). Berikut adalah Tabel perkembangan uang beredar di Indonesia selama periode tahun 2001 sampai 2013, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar selama Periode 2001-2013

Tahun	Jumlah Uang Beredar			
	M1 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan M1 (%)	M2 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan M2 (%)
2001	177.731	9,58	844.053	12,99
2002	191.939	7,99	883.908	4,72
2003	223.799	16,6	955.692	8,12
2004	253.818	13,41	1.033.527	8,14
2005	281.905	11,07	1.203.215	16,42
2006	361.073	28,08	1.382.073	14,87
2007	460.842	27,63	1.649.662	19,36
2008	466.379	1,20	1.898.891	15,10
2009	501.254	7,47	1.975.681	4,04
2010	526.741	5,09	2.272.347	15,02
2011	634.788	20,51	2.623.673	15,46
2012	758.404	19,47	3.098.113	18,08
2013	842.936	11,15	3.511.921	13,36

Sumber : SEKI Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan uang beredar dalam arti luas (M2) selama periode 2001 sampai 2013 yang mengalami fluktuasi yang beragam, uang beredar tertinggi terjadi pada periode 2007 sebesar 19,36 persen, kemudian bergerak turun pada periode 2008 sebesar 15,10 persen setelah dalam perkembangnya setiap tahun uang beredar terendah diperoleh pada periode 2009 yaitu sebesar 4,04 persen namun kemudian mengalami kenaikan pada periode 2010 yaitu sebesar 15,02 persen dan kemudian mengalami peningkatan pada periode 2011 sebesar 18,08 persen hingga kemudian mengalami penurunan pada periode 2013 sebesar 13,36 persen.

Target stabilitas ekonomi makro sulit tercapai jika target pengendalian jumlah uang beredar sulit diukur. Pengendalian sangat erat kaitannya dengan perilaku permintaan uang masyarakat terutama untuk jangka panjang. Pengendalian Bank Indonesia atas inflasi sangatlah terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bank Indonesia selalu melakukan *assessment* terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil *assessment* tersebut. Pengendalian inflasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil. Untuk itulah koordinasi dan kerjasama antar lembaga lintas sektoral sangatlah penting dalam menangani masalah inflasi ini (Surjaningsih dkk, 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan inflasi dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, inflasi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar dua kebijakan tersebut. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, investigasi terhadap pengaruh defisit anggaran, uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia merupakan tema yang menarik untuk diteliti. Penelitian pengaruh defisit anggaran terhadap inflasi telah banyak dilakukan di Indonesia antara lain Waluyo (2006), yang menganalisis tentang dampak pembiayaan defisit anggaran dengan utang luar negeri terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 1970-2003. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan hutang luar

negeri akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat *inflationary*. Sementara itu, hasil berbeda ditemukan oleh Setiawan (2008), dimana ditunjukkan bahwa dalam jangka panjang yang mempengaruhi tingkat inflasi adalah inflasi itu sendiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pengaruh defisit anggaran, jumlah uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Periode waktu penelitian dari tahun 2001.1 hingga 2013.4. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1—2013.4?
2. Bagaimana pengaruh uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1—2013.4?
3. Bagaimana pengaruh PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1—2013.4?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1–2013.4.
2. Menganalisis pengaruh uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1–2013.4.
3. Menganalisis pengaruh PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 2001.1–2013.4.
4. Menganalisis pengaruh defisit anggaran, jumlah uang beredar, dan PDB secara bersama-sama terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2001.1–2013.4

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan defisit anggaran, uang beredar, PDB dan inflasi di Indonesia.
2. Dapat menambah literatur ilmiah yang menganalisis pengaruh defisit anggaran, uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi.
3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansisama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab untuk membantu mempermudah proses penelitian dan pemahaman dengan rincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian yang mendasari dilakukannya penelitian mengenai pengaruh defisit anggaran, uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2001.1–2013.4.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu berkaitan dengan inflasi yang dipengaruhi oleh defisit anggaran, uang beredar, dan PDB. Selain itu juga dibahas hasil penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini dijelaskan deskripsi obyek penelitian, hasil dan analisis pengaruh defisit anggaran, uang beredar, dan PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2001.1–2013.4.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan, rekomendasi kebijakan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari penjelasan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Inflasi

Nugroho (2012) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena atau dilema ekonomi. Ada tiga aspek yang tercakup di dalam pengertian inflasi tersebut :

1. Adanya kecenderungan (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat .
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga-harga secara umum.

2.1.2 Jenis Inflasi

Boediono (1988) menggolongkan jenis-jenis inflasi berdasarkan “parah-tidaknya” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jenis Inflasi

No	Jenis Inflasi	Persentase
1	Inflasi ringan (<i>creeping inflation</i>)	Dibawah 10 % setahun
2	Inflasi sedang	10% - 30% setahun
3	Inflasi berat	30% - 100% setahun
4	Hyperinflasi (<i>hyper inflation</i>)	Diatas 100 % setahun

Sumber : Boediono, 1988.

2.1.3 Jenis Inflasi Menurut Asal Dari inflasi

Boediono (1988) menjelaskan inflasi yang terjadi pada suatu negara bisa berasal dari :

1. Dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Inflasi ini biasanya dialami negara-negara berkembang yang sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Inflasi semacam ini terjadi karena adanya aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih, sehingga dapat mengakibatkan :

- a. Secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.

- b. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor.
- c. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.

2. Dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor di dalam negeri, adalah:

- a. Terjadi defisit anggaran secara terus-menerus yang akhirnya ditutup dengan mencetak uang baru. Penciptaan uang baru yang berlebihan, dapat menyebabkan inflasi.
- b. Terjadinya gagal panen. Gagal panen dapat mengurangi penawaran di pasar. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, pada akhirnya harga akan meningkat, dapat menyebabkan inflasi.
- c. Terjadi pembatasan kredit untuk produksi. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan harga barang dari waktu ke waktu semakin naik. Jika harga naik, para produsen cenderung akan menyimpan barangnya untuk mendapatkan harga yang setinggi-tingginya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan barang oleh konsumen dengan barang yang disediakan oleh produsen, harga juga akan ikut naik.

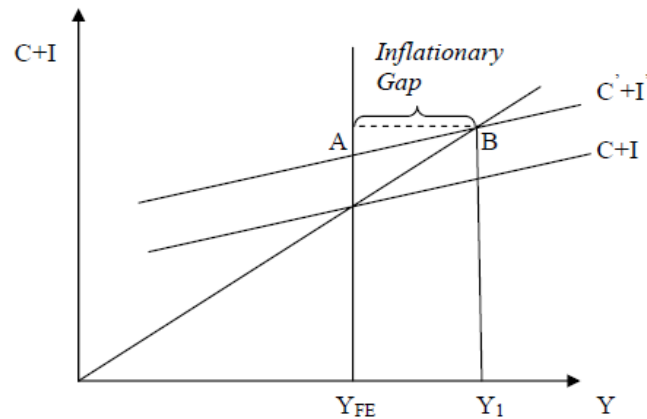
2.1.4 Penyebab Inflasi

Secara konseptual inflasi bisa disebabkan oleh beberapa sumber. Nopirin (1988) mengelompokkan beberapa penyebab inflasi sebagai berikut:

1. *Demand-pull Inflation*

Adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan total (*aggregat demand*) atau permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat, dan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan kondisi kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output). Jika kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan Inflasi murni). Jika kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya '*inflationary gap*'. *Inflationary gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi. Secara grafik digambarkan sebagai berikut :

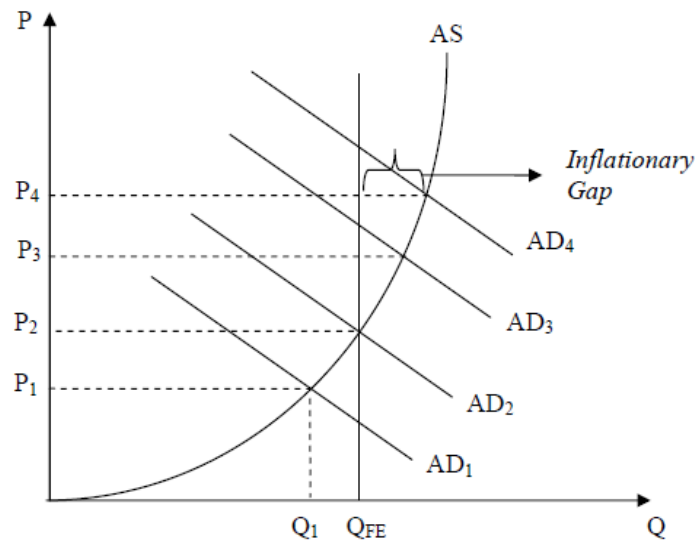
Gambar 2.1
Inflationary Gap



Sumber : Nopirin, Ekonomi Moneter : Edisi Kesatu, 1988,28.

Kenaikan pengeluaran total dari $C + I$ menjadi $C' + I'$ akan menyebabkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP *full employment* (Y_{FE}). Jarak A – B atau $Y_{FE} - Y_1$ menunjukkan besarnya *inflationary gap*. Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total proses terjadinya *demand-pull inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Demand Pull Inflation



Sumber : Nopirin, *Ekonomi Moneter* : Edisi Kesatu, 1988, 29.

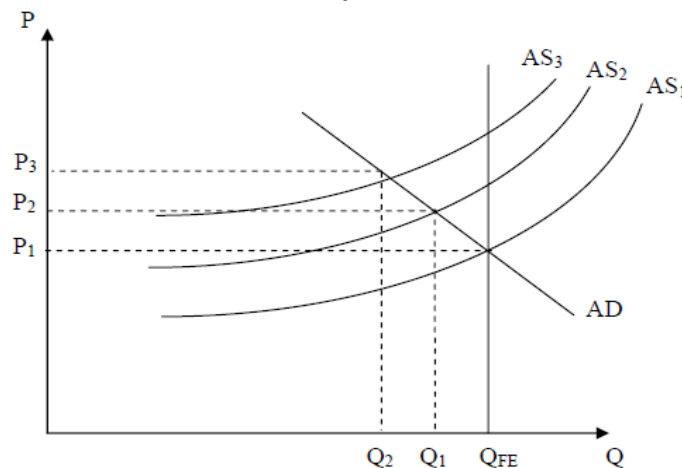
Bermula dengan harga P_1 dan output Q_1 , kenaikan permintaan total dari AD_1 ke AD_2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi P_2 dan output naik menjadi Q_{FE} . Kenaikan AD_2 selanjutnya menjadi AD_3 menyebabkan harga naik menjadi P_3 , sedang output tetap pada Q_{FE} . Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya inflationary gap. Proses kenaikan harga ini akan berjalan terus sepanjang permintaan total terus naik (misalnya menjadi AD_4).

2. *Cosh-push Inflation*

Adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang diikuti dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya

produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul *cost push inflation*. Gambar 2.3 menjelaskan proses terjadinya *cost-push inflation*.

Gambar 2.3
Cost Push Inflation



Sumber : Nopirin, Ekonomi Moneter : Edisi Kesatu, 1988, 31.

Bermula pada harga P_1 dan Q_{FE} . Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS_1 menjadi AS_2 . konsekuensinya harga naik menjadi P_2 dan produksi turun menjadi Q_1 . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS_3 , harga naik dan produksi turun menjadi Q_2 . Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke

atas. Proses kenaikan harga ini (yang sering diikuti dengan turunnya produksi) disebut dengan *cost-push inflation*.

2.1.5 Teori Inflasi

Menurut Boediono (1988) secara garis besar ada tiga teori mengenai inflasi, yaitu Teori Kuantitas (Teori Irving Fisher), Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam keadaan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok.

1. Teori Kuantitas (Teori Irving Fisher)

Teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas tersebut dikemukakan oleh Irving Fisher, dengan rumus sebagai berikut:

$$M \cdot V = P \cdot T \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

- M = *Money incirculation* (jumlah uang yang beredar)
- V = *Velocity of circulation* (kecepatan peredaran uang)
- P = *Price* (tingkat harga rata-rata barang)
- T = *Trade* (jumlah barang yang diperdagangkan)

Teori ini adalah teori yang paling tua dan masih sangat berguna untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Boediono, 1988). Teori ini lebih menyoroti peranan dalam proses terjadinya inflasi yang disebabkan dua faktor berikut:

- a. Jumlah uang beredar bahwa inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar (baik penambahan uang kartal maupun uang giral. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar maka tidak akan terjadi inflasi, meskipun terjadi kenaikan harga. Misalnya saja jika terjadi kegagalan panen, harga cenderung naik, namun kenaikan harga beras tersebut hanya sementara waktu saja dan tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Dengan demikian, bila jumlah uang beredar tidak ditambah lagi, inflasi akan berhenti dengan sendirinya.
- b. Ekspetasi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga.

Ada tiga kemungkinan keadaan :

- a. Pertama, apabila masyarakat belum meramalkan harga-harga untuk naik pada waktu mendatang. Maka sebagian besar penambahan jumlah uang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah uang kasnya yang berarti sebagian besar kenaikan jumlah uang beredar tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Hal ini menyebabkan tidak ada kenaikan permintaan dan tidak ada kenaikan harga barang-barang. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi dimulai dan masyarakat belum menyadari adanya inflasi.

- b. Kedua, dimana masyarakat mulai sadar akan adanya inflasi dan meramalkan adanya kenaikan harga barang-barang pada waktu mendatang. Penambahan jumlah uang beredar tidak lagi digunakan masyarakat untuk menambah uangnya melainkan untuk membeli barang. Hal ini dilakukan karena masyarakat ingin menghindari kerugian akibat memegang uang kas. Keadaan ini berarti terdapat kenaikan permintaan barang-barang tersebut dan selanjutnya harga barang-barang tersebut akan meningkat.
- c. Ketiga, merupakan tahapan yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menaik).

2. Teori Keynes

Teori ini menyatakan, bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi) (Boediono, 1988).

Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif akan barang-

barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan ini bisa juga dari serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji para anggotanya melebihi kenaikan produktivitas kerja buruh (Boediono, 1988).

Apabila permintaan efektif dari golongan-golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul. Akibatnya, akan terjadi kenaikan harga-harga barang. Dengan adanya kenaikan harga, sebagian dari rencana pembelian barang dari golongan-golongan tadi tentu tidak bisa terpenuhi. Pada periode berikutnya, golongan-golongan yang tidak bisa memenuhi rencana pembelian barang tadi, akan berusaha memperoleh dana lagi (baik dari pencetakan uang baru, kredit bank, atau kenaikan gaji). Tentunya tidak semua golongan tersebut berhasil memperoleh tambahan dana yang diinginkan (Boediono, 1988).

Golongan yang berhasil memperoleh tambahan dana lebih besar bisa memperoleh bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak bisa memperoleh tambahan dana akan memperoleh bagian output yang lebih sedikit. Golongan yang kalah dalam perebutan ini adalah golongan yang berpenghasilan tetap atau yang penghasilannya

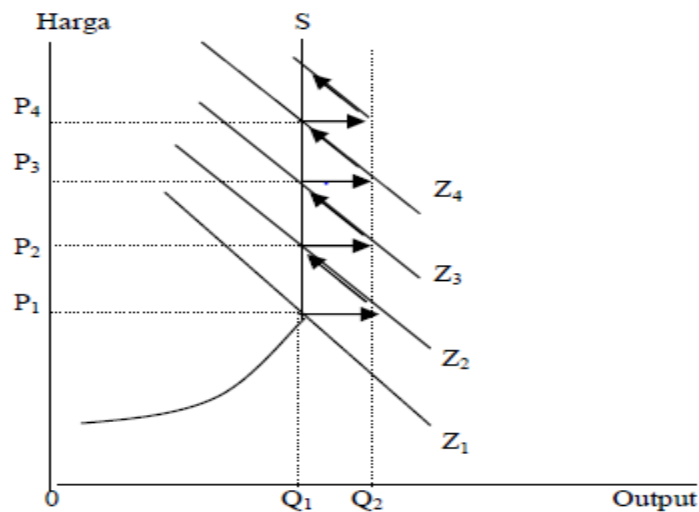
tidak naik secepat kenaikan laju inflasi (pensiunan, PNS, petani, karyawan perusahaan yang tidak mempunyai serikat buruh). Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti jika permintaan efektif total tidak melebihi jumlah output yang tersedia (Boediono, 1988).

Proses timbulnya *inflationary gap*, dapat dijelaskan melalui Gambar. 2.4 dibawah. Dengan mengasumsikan bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana, pada tingkat harga-harga yang berlaku, untuk membiayai rencana-rencana pembelian barang-barang. Pemerintah memperbesar pengeluaran dengan mencetak uang baru. Berarti terjadi *inflationary gap*, dalam hal ini sebesar Q_1Q_2 yang ditandai bergesernya kurva permintaan agregat dari Z_1 ke Z_2 . Akibatnya harga naik dari P_1 ke P_2 . Dengan kenaikan harga ini, golongan masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi permintaannya karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak dapat melebihi Q_1 , sehingga yang terjadi hanya *realokasi* barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan lain dalam masyarakat ke sektor pemerintah. Seandainya pada periode berikutnya, golongan masyarakat lain bisa memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya dengan harga yang baru, dan pemerintah juga tetap berbuat demikian maka *inflationary gap* Q_1Q_2 akan tetap timbul. Harga akan naik dari P_1 ke P_3 (Boediono, 1995).

Apabila golongan-golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh dana untuk membiayai rencana-

rencana pembelian tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka *inflationary gap* akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Dalam hal ini harga-harga akan terus naik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (Boediono, 1995).

Gambar 2.4
Proses Terjadinya *Inflationary Gap*

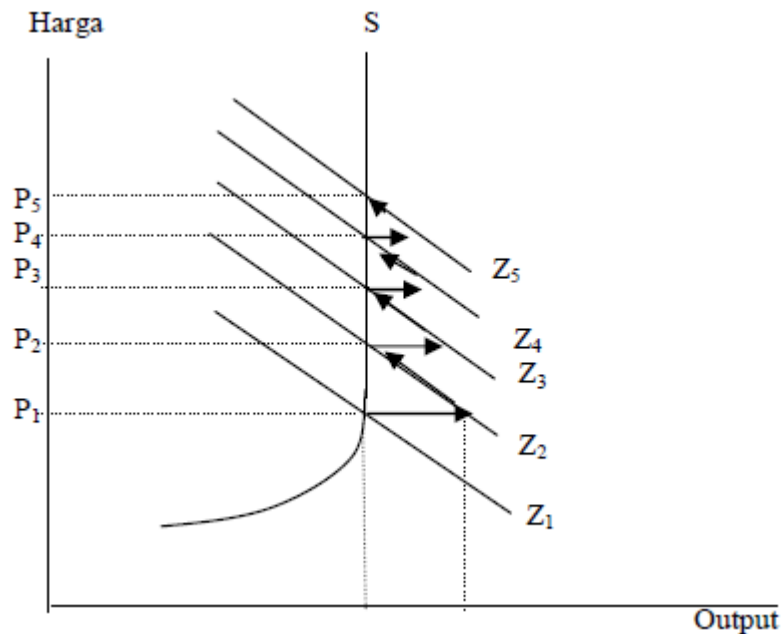


Sumber : Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat, 1995, 165.

Gambar 2.5 menunjukkan proses inflasi yang akhirnya berhenti karena *inflationary gap* makin mengecil dan akhirnya hilang pada periode ke-lima. Harga menjadi stabil pada P_5 . Dibalik proses ini beberapa golongan masyarakat menerima

bagian *output* yang lebih kecil. Inflasi selalu diikuti dengan terjadinya redistribusi pendapatan.

Gambar 2.5
Inflasi berhenti karena *Inflationary Gap* mengecil



Sumber : Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat, 1995, 166.

3. Teori Strukturalis

Teori ini juga teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi terutama yang terjadi di negara berkembang (Boediono, 1988). Ada dua kekakuan/ketidakelestisan dalam perekonomian di negara berkembang yang menimbulkan inflasi yaitu:

a. Kekakuan dari penerimaan impor

Hal ini dikarenakan nilai ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor lain dikarenakan harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut tidak

menguntungkan atau dengan kata lain *term of trade* semakin memburuk. Hal lain yang menyebabkan ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor lain adalah produksi barang-barang ekspor tidak elastis terhadap kenaikan harga. Dengan demikian, akan mendorong pemerintah menggerakkan produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*).

b. Kekakuan penawaran bahan makanan di negara berkembang

Penawaran bahan makanan lebih lambat daripada pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga kenaikan harga bahan makanan dalam negeri cenderung untuk naik melebihi harga barang-barang lainnya. Akibatnya timbul tuntutan dari buruh untuk meminta upah yang lebih tinggi. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang yang bersangkutan. Kenaikan harga barang-barang tersebut mendorong terjadinya inflasi yang dikenal dengan istilah *wage push inflation*.

2.2 Kebijakan Fiskal

Diskusi tentang kebijakan fiskal adalah berkaitan dengan kepentingan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap hak penerimaan melalui pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki pengaruh yang bersifat memperbesar pendapatan nasional (*expansionary*), tetapi penerimaan pemerintah dapat bersifat mengurangi pendapatan nasional (*contractionary*). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional tergantung pada jenis pengeluarannya, sedangkan untuk penerimaan pemerintah

pengaruhnya tergantung pada jenis sumber penerimaan pemerintah tersebut (Suparmoko, 1992).

Dalam implementasinya kebijakan fiskal dilakukan saat pemerintah menjalankan *adjustment* (penyesuaian) antara penerimaan pajak (*tax reveue*) dengan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yang berdampak pada tingkat penciptaan lapangan kerja, harga (inflasi), dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Konsep kebijakan fiskal pertama kali diterapkan dalam skala besar di Amerika pada tahun 1930-an yaitu pada saat depresi melanda perekonomian Amerika. Saat itu pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai berbagai jenis proyek agar dapat menampung banyak tenaga kerja (akibat banyaknya pengangguran) dan bertujuan untuk merehabilitasi perekonomian yang lesu (Laksana, 2003).

Tujuan kebijakan fiskal adalah menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum dilain pihak. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makro yang bertujuan untuk menggairahkan perekonomian (*ekspansif*) apabila kondisi perekonomian sedang mengalami resesi serta bertujuan untuk mengurangi (*kontraktif*) apabila perekonomian sedang memanas (*overheating*) untuk menurunkan permintaan. Kebijakan fiskal mempunyai saluran yang bervariasi, karena seluruh kebijakan fiskal ini dapat tercermin melalui kebijakan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Abimanyu (2009) menjelaskan bahwa jenis kebijakan fiskal yang sering ditempuh oleh pemerintah dalam rangka

menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

2.2.1 APBN dan Kebijakan Fiskal

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tersebut setiap tahunnya ditetapkan melalui undang-undang.

APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasa adalah satu tahun. APBN disusun berdasarkan tahun kalender yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan, tetapi adapula yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Sejak tahun 1969 APBN Indonesia dimulai pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya (Suparmoko, 1994). Akan tetapi, sejak tahun 2000 (masa peralihan) dilakukan penyesuaian kembali dengan tahun kalender yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember. Setelah tahun 2000 sampai pada saat ini APBN disusun berdasarkan tahun kalender yaitu 1 Januari dan diakhiri kembali pada tanggal 31 Desember (Nota Keuangan, 2001).

Sebelum tahun 2001, prinsip APBN di Indonesia adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, sejak tahun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Pada format *T-account*, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Pada format *I-account*, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara.

Sejak tahun anggaran 2005, sejalan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah mulai menjalankan format belanja negara (khususnya belanja pemerintah pusat) yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional. Sebelumnya, pemerintah menggunakan anggaran "*dual budgeting*" di mana dipisahkan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kelemahan antara lain:

1. Kurang jelasnya pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan yang menyebabkan terjadinya duplikasi belanja;
2. Kurang efisien dalam penyusunan belanja karena untuk satu jenis belanja terdapat akun untuk belanja rutin dan akun untuk belanja pembangunan; dan juga kesulitan dalam mengaitkan *output/outcome* dengan penganggaran

organisasi terutama untuk belanja pembangunan, mengingat proyek sifatnya sementara dan keberlanjutan tanggung jawab atas asset serta kewajiban dari suatu proyek yang sudah selesai masih kurang jelas.

Namun demikian, sejak tahun 2005 pemerintah telah menggunakan anggaran terpadu "*unified budgeting*", di mana tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.

Menurut Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia (2013), terdapat tiga kelompok besar dalam postur APBN, komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan negara dan hibah, yaitu semua penerimaan negara dalam satu tahun anggaran yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh negara. Besaran pendapatan negara dan hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembanganekonomi nasional dan internasional yang terkini pada asumsi dasar ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri merupakan sumber penerimaan negaraterbesar, dengan menyumbangkan sekitar 99,7 persen dari total penerimaan negara. Hal ini terkaitkebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri agar dapat mendukungkebijakan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Penerimaan perpajakan merupakan sumberutama dengan proporsi sekitar 69-70 persen dari total penerimaan dalam negeri, dan pemerintahmelaksanakan optimalisasi penerimaan

perpajakan melalui kebijakan *tax policy and administration reform* yang meliputi reformasi di bidang administrasi, bidang peraturan dan perundang-undangan, bidang pengawasan dan penggalian potensi.

2. Belanja Negara

Adalah semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. besaran belanja yang tercantum dalam APBN merupakan batas tertinggi, sehingga tidak dapat dilampaui. Belanja negara ini memiliki peran yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian; saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan belanja pemerintah pusat yang ekspansif dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas serta memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif (*over heating*), kebijakan belanja pemerintah pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif.

3. Pembiayaan

Adalah semua penerimaan negara yang harus dibayar kembali/pengeluaran negara yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya serta penjualan asset dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pembiayaan ini muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal dari non utang dan utang dalam negeri dan juga menjaga *net outflow* (jumlah penarikan pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman), dikarenakan memiliki resiko yang lebih rendah (lebih fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan resiko utang) dibandingkan pembiayaan lainnya serta memiliki *multiplier effect* yang positif pada perekonomian nasional.

Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap PDB. Apabila kita menghitung defisit anggaran negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. Kecuali itu, dengan menghitung besarnya persentase defisit anggaran negara terhadap PDB juga menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan perekonomian. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah mulai membatasi defisit nasional 3 persen dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi (Meilani, 2013).

Menurut Soediyono (1997) dan buku dasar-dasar penyusunan APBN (2013) terdapat enam fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu:

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
3. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yaitu anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga, mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu untuk dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Kelangkaan akan barang dan jasa dalam

masyarakat akan mengundang berbagai kerawanan dalam masyarakat. Tanpa adanya prakarsa pemerintah kemungkinan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi dengan baik.

5. Fungsi distribusi, yaitu mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Keadilan dalam pembagian pendapatan nasional merupakan unsur yang sangat asasi yang harus dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

2.2.2 Defisit Anggaran

Menurut Soediyono (2000), defisit anggaran dapat dijelaskan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor (perekonomian tertutup). Dalam perekonomian tiga sektor tidak dibahas sektor perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan sektor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Dalam perekonomian tertutup dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pendapatan nasional terdiri dari, yaitu :

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

- Y : Pendapatan Nasional
- C : Pengeluaran konsumsi
- I : Pengeluaran investasi

G : Pembelian pemerintah

Rumah tangga mengkonsumsi sebagian output perekonomian, perusahaan dan rumah tangga menggunakan sebagian output untuk investasi, dan pemerintah membeli sebagian output untuk kepentingan publik. Rumah tangga menerima pendapatan dari tenaga kerja dan modal yang mereka miliki, membayar pajak kepada pemerintah, dan kemudian memutuskan berapa banyak dari pendapatan setelah pajak (*disposable income*) digunakan untuk konsumsi dan berapa banyak yang ditabung. Pembelian pemerintah atau pengeluaran konsumsi pemerintah pusat dan lokal, pembelian ini hanyalah salah satu jenis pengeluaran pemerintah. Jenis pengeluaran lain adalah pembayaran transfer kepada rumah tangga. Pembayaran transfer tersebut mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa secara langsung. Pembayaran transfer adalah lawan dari pajak, pembayaran transfer meningkatkan *disposable income* rumah tangga, sedangkan pajak mengurangi *disposable income*.

$$Y_d = Y + Tr - Tx \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana:

Y_d : Pendapatan disposabel

Tr : transfer pemerintah

Tx : pajak

Dari persamaan tersebut dapat diturunkan persamaan berikut :

$$Y = Y_d - Tr + Tx \dots\dots\dots(2.3)$$

Mengingat bahwa *disposable income* tersebut digunakan untuk konsumsi dan sisanya merupakan *saving*, maka dapat ditulis:

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana :

C : Konsumsi

S : *Saving*

Kemudian persamaan 2.1 disubstitusikan ke persamaan 2.3, sehingga diperoleh:

$$Y_d - Tr + Tx = C + I + G \dots\dots\dots(2.5)$$

Dengan memperhatikan persamaan 2.4, dapat ditemukan:

$$C + S - Tr + Tx = C + I + G \dots\dots\dots(2.6)$$

Ini berarti:

$$I + G + Tr = S + Tx \dots\dots\dots(2.7)$$

Dalam perekonomian dengan adanya tindakan fiskal, untuk keseimbangan pendapatan nasional, syarat terpenuhinya kesamaan $S = I$, tidak berlaku. Meskipun $S \neq I$ asalkan $S + Tx = I + G + Tr$, maka pendapatan nasional akan mencapai keseimbangan yang berlaku. Menurut Mankiw (2006), secara garis besar tabungan nasional diciptakan oleh tiga pelaku, yaitu pemerintah, perusahaan dan rumah tangga. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan merupakan kelebihan pendapatan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang besarnya dapat diketahui dari neraca perusahaan. Sedangkan tabungan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Jika pajak dikurangi pembayaran transfer bernilai positif, maka pemerintah akan mengalami surplus anggaran. Namun jika pajak dikurangi pembayaran transfer,

bernilai negatif berarti pemerintah mengalami defisit anggaran, yang didanai dengan menerbitkan surat utang pemerintah, yaitu dengan meminjam dari pasar keuangan.

Menurut Soediyono (2000), ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai apa yang dimaksud APBN defisit, surplus, dan seimbang. Masing-masing definisi mempunyai arti ekonomis (dan implikasi makro) yang berbeda satu sama lain. Konsep atau definisi defisit anggaran tersebut bervariasi. Perbedaan definisi tersebut diaplikasikan oleh berbagai penguasa fiskal maupun oleh para peneliti didasari oleh perbedaan metode pencatatan dan oleh perbedaan tujuan analisis dampak defisit anggaran terhadap berbagai sektor perekonomian.

Defisit anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Kedua komponen tersebut adalah defisit primer dan komponen pembayaran bunga utang. Defisit primer adalah selisih antara pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pembayaran bunga utang) dengan seluruh penerimaan pemerintah (tidak termasuk utang baru dan pembayaran bunga utang). Komponen defisit anggaran tersebut bertujuan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah (Dornbusch, 1989).

Selain beban bunga utang yang bersifat endogen, penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara umum juga dipengaruhi oleh kondisi siklus perekonomian. Ada hubungan timbal balik antara defisit anggaran dengan perekonomian. Kondisi siklus atau defisit struktural tersebut perlu dihilangkan, agar mencapai defisit anggaran yang diskrit. Defisit anggaran struktural atau siklus adalah defisit anggaran yang disebabkan oleh pengaruh gejolak perekonomian serta defisit anggaran yang diskrit

adalah defisit anggaran yang terbebas dari pengaruh siklus perekonomian (Maryatmo, 2005).

Menurut Simanjutak dalam Waluyo (2006) masih ada beberapa definisi dari defisit anggaran dan masih sangat tergantung pada konsep yang digunakan serta tujuan analisis. Serta pilihan konsep defisit tersebut yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain: jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities*. Beberapa konsep ukuran defisit anggaran lainnya terangkum dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel. 2.2
Ringkasan Metode Perhitungan Defisit/Surplus Anggaran

Jenis Defisit	Metode
Defisit Konvensional dan Defisit Keseluruhan	a. $DEF = (R + A) - (G + B)$; atau b. $DEF = (R + A + D) - (G + B)$; atau c. $DEF = (R - A) - Tx$; atau d. $DEF = (R + A) - G$
Defisit Fiskal Berjalan dan Konsep Nilai Bersih	$DEF = S_g = R_d - G_r$
Defisit Domestik	$DEF = R_d - G_d$
Defisit Moneter	$D_b = R - (G - (D_f + D_{nb}))$
Augmented Defisit Primer	$DEF = (R - A) - (G - B) \left\} - \frac{[i*(1+\epsilon)+\epsilon-i]}{(1+\pi)(1+g)}(D - FR) + S$
Defisit Operasional	a. $DEF = ((R - A) - G) - iB$; atau b. $DEF = ((R - A) - (G - B)) + iB$
Defisit APBN Indonesia	Primer : $DEF = (R + A) - (G - B)$ Anggaran : $DEF = (R + A) - G$

Sumber : Waluyo, 2006.

Keterangan:

Jika nilai sisi kiri persamaan negatif (-) maka menunjukkan terjadinya defisit, dan berlaku pula sebaliknya.

- DEF = Defisit Anggaran.
- i^* = Suku Bunga Utang Luar Negeri
- g = Pertumbuhan Ekonomi
- B = Pembayaran Bunga Utang
- Sg = Tabungan Pemerintah.
- D = Total Utang Pemerintah.
- R = Total Penerimaan Pemerintah.
- Gd = Pengeluaran Dalam Negeri.
- Rd = Penerimaan Dalam Negeri.
- Df = Utang Luar Negeri Pemerintah.
- A = Total Hibah.
- FR = Cadangan Devisa Luar Negeri.
- Gr = Pengeluaran Rutin (DN + LN).
- Db = Utang dari Sektor Perbankan.
- G = Total Pengeluaran Pemerintah.
- S = *Seignorage*.
- Dnb = Utang DN dari Non Perbankan.
- Π = Tingkat Inflasi.
- Tx = Penerimaan Pajak.
- ε = Nilai Tukar.
- i = Suku Bunga Riil.

2.2.3 Sebab-sebab Defisit Anggaran

Menurut Kunarjo (2001) ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran, yaitu:

1. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Beban ini meliputi pembangunan program-program, seperti :

- a. Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan,
- b. Program yang berkaitan dengan Hankam,
- c. Pembangunan yang meliputi bidang hukum, seperti proyek-proyek pengadilan, lembaga pemasyarakatan,
- d. Program bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan,
- e. Program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, seperti program transmigrasi, pembangunan daerah,
- f. Program yang menangani masalah kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT).

Semuanya itu diperlukan biaya yang besar, dan diantaranya harus dilaksanakan oleh negara, terutama program nomor b, c, e, dan f, karena swasta/ masyarakat tidak mungkin membangun program-program seperti itu.

2. Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya.

Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal Perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.

4. Melemahnya Nilai Tukar

Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak. Misalnya apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang

dollar AS, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

Semenjak tahun 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini disahkan, istilah SUN lebih dikenal sebagai "*obligasi pemerintah*". SUN terdiri dari dua jenis adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) semacam *T-Bills* di AS. SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI) dan Obligasi Negara (ON) merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/ atau pembayaran bunga secara diskonto. Tujuan penerbitan SUN adalah untuk membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara dalam satu tahun anggaran serta untuk mengelola portofolio utang negara (Undang - Undang No. 24 Tahun 2002).

5. Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektorsektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

6. Realisasi yang Menyimpang dari Rencana

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

7. Pengeluaran Karena Inflasi

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu.

2.2.4 Dampak Defisit Anggaran

Lebih jauh, Kunarjo (2001) menjelaskan bahwa defisit anggaran akan berdampak pada beberapa variabel makro ekonomi, beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Tingkat Bunga

Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap uang meningkat. Bunga, yang merupakan harga modal itu, akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat bunga akan meningkat.

2. Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dalam perekonomian terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Oleh sebab itu, menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis.

3. Dampak Terhadap Tingkat Inflasi

Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Hal ini disebabkan karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaran-pengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.

4. Dampak Terhadap Pengangguran

Pengangguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian, defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat pengangguran.

5. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun.

6. Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan

Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, juga tingkat bunga yang rendah. Tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.

2.2.5 Kontroversi Dampak Defisit Anggaran

Ada tiga kelompok yang berbeda pendapat dalam hal dampak defisit anggaran terhadap perekonomian. Ketiga kelompok tersebut adalah kaum Ricardian, Keynesian, dan Neoklasik.

2.2.5.1 Kelompok Ricardian(*Ricardian Equivalence*)

Richardian equivalence hypothesis(REH) menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi makro. Hipotesis ini didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat memiliki asa nalar (*rational expectation*) terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Bagi masyarakat yang rasional, kebijakan pemerintah menempuh anggaran defisit dengan memotong pajak memberikan dampak kenaikan pendapatan setelah pajak untuk saat ini. Namun, pada masa yang akan datang pemerintah perlu membayar cicilan dan bunga atas utang yang terakumulasi tersebut. Cara yang ditempuh oleh pemerintah biasanya dengan menaikkan pajak. Jadi penurunan pajak saat ini dipandang oleh konsumen hanya memberikan pendapatan sementara (*transitory income*) saja dan pada masa yang akan datang akan "diambil kembali" oleh pemerintah. Dengan demikian konsumen tidak akan meningkatkan pengeluarannya saat ini (Mankiw, 2005).

REH juga mengajukan hipotesis bahwa beberapa kebijakan pemerintah tidak akan membawa dampak yang penting bagi perekonomian (*neutralitypreposition*). REH menggabungkan dua pendekatan fundamental, yaitu kendala anggaran pemerintah dan *Permanent Income Hypothesis* (PIH). Kendala anggaran pemerintah menyatakan jika pengeluaran pemerintah tidak mengalami perubahan maka tingkat pajak yang rendah pada periode sekarang akan diimbangi oleh kenaikan tingkat pajak pada periode mendatang. Dengan demikian, PIH menyatakan bahwa rumah tangga akan merespon melalui keputusan konsumsi berdasarkan pada *permanent income* yang besarnya sangat tergantung oleh nilai pendapatan setelah pajak pada periode

sekarang. Pembiayaan defisit anggaran dengan memotong pajak sekarang akan berpengaruh pada beban pajak periode mendatang, tetapi tidak dalam nilai periode sekarang sehingga pemotongan pajak tidak akan mengubah *permanent income* atau konsumsi (Waluyo, 2006). *Neutrality preposition* harus ditanggapi dengan sangat hati-hati, walaupun suku bunga tidak berubah karena penerbitan obligasi negara, tetapi suku bunga dapat mengalami perubahan karena adanya tambahan pengeluaran pemerintah. Menurut Barro (1974), setiap pembiayaan defisit anggaran dengan penerbitan obligasi negara akan diimbangi oleh kenaikan pajak di masa periode mendatang. Kenaikan tingkat pajak tidak perlu membuat masyarakat takut terhadap kemakmurannya (*wealth*) karena kenaikan pajak pada periode mendatang akan diantisipasi dengan meningkatkan tabungan sekarang dan mengurangi konsumsi sekarang. Implikasinya, individu tidak menggunakan semua kekayaannya (pendapatannya) untuk meningkatkan konsumsinya karena penerbitan obligasi negara. Individu akan menyimpan seluruhnya untuk mengantisipasi kenaikan beban pajak di kemudian hari sehingga hal itu tidak akan menaikkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Jika pemerintah meningkatkan pajak hari ini untuk membayar utang obligasi negara maka individu akan memandang kebijakan ini sama dengan menggantikan pajak saat ini untuk pajak yang akan datang (pada *present value* yang sama). Kebijakan ini akan menggeser titik *endowment* tetapi nilai aliran pendapatan sekarang secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. Individu akan memilih berkonsumsi

dan akan lebih banyak meminjam sekarang sampai terjadi kenaikan dalam *present value* pajak.

REH juga berpendapat bahwa perubahan dalam pajak dan pembiayaan defisit anggaran mempunyai dampak yang sama bagi variabel makro (terutama konsumsi swasta). REH dibangun dari premis bahwa penerbitan obligasi negara pada saat ini selalu disertai dengan rencana kenaikan pajak di masa mendatang. Pembiayaan utang pemerintah diasumsikan hanya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perpajakan sehingga konsumsi agregat akan tetap. Dalam kerangka pemikiran REH individu mengasumsikan pajak yang akan datang sama dengan besarnya beban utang pemerintah (Barro, 1989).

2.2.5.2 Kelompok Keynesian

Kelompok kaum Keynesian berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian. Pertama, kelompok Keynesian mengasumsikan bahwa ada kemungkinan sumber daya tidak digunakan secara penuh. Kedua, pelaku ekonomi mempunyai pandangan yang bersifat *myopic*. Sifat ini menggambarkan adanya hubungan antar generasi yang erat. Ketiga, aliran Keynesian lebih memfokuskan diri pada efek defisit anggaran temporer yang disebabkan oleh fluktuasi perekonomian (Berheim, 1989).

Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, dan konsumsi pada giliran berikutnya. Defisit anggaran yang dibiayai utang, yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan.

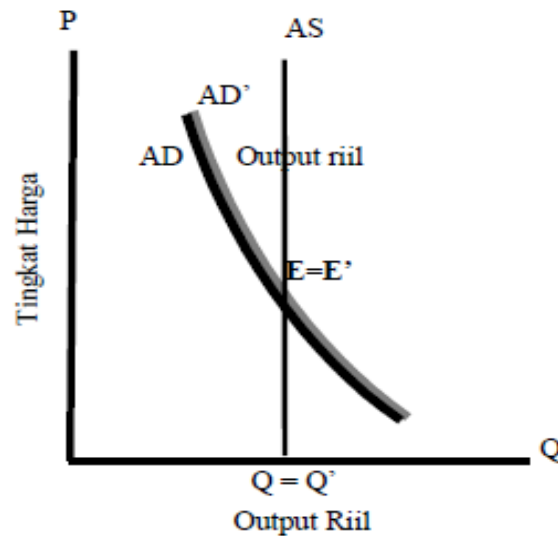
Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya, peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian melalui *multiplier efek Keynesian*. Karena defisit anggaran meningkatkan konsumsi dan tingkat pendapatan sekaligus, tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga meningkat. Menurut kaum Keynesian secara keseluruhan, defisit anggaran dalam jangka pendek akan menguntungkan perekonomian (Pramuji, 2008).

Namun demikian, pengeluaran pemerintah yang meningkat secara terus-menerus merupakan kebijakan yang tidak mungkin dilakukan, ada suatu batas jumlah total yang mungkin dikeluarkan pemerintah yaitu tidak bisa mengeluarkan lebih dari 100 persen dari PDB. Faktanya, sebelum batas tersebut dicapai, proses politik akan menghentikan pengeluaran pemerintah yang meningkat tersebut. Seperti saat terjadinya penyusunan anggaran pemerintah, dimana antara publik, politikus dan pemerintah pasti akan berdebat tentang keseimbangan anggaran dan belanja pemerintah agar memiliki target yang tepat bagi perekonomian. Tentu saja persepsi publik dan politikus sedikit banyak menentukan batas yang wajar untuk pengeluaran pemerintah dapat naik. Dengan demikian, kelompok Keynesian menganggap bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh kebijakan fiskal semata (Andrian, 2011).

2.2.5.3 Kelompok Neoklasik

Kelompok kaum Neoklasik mengemukakan pendapat bahwa setiap individu mempunyai informasi yang cukup, sehingga mereka dapat merencanakan tingkat konsumsi sepanjang waktu hidupnya. Defisit anggaran akan meningkatkan tingkat konsumsi sepanjang waktu hidupnya. Defisit anggaran akan meningkatkan tingkat konsumsi dalam jangka panjang dengan cara membebankan pajak untuk generasi berikutnya. Jika seluruh sumber daya secara penuh dapat digunakan, maka peningkatan konsumsi akan menurunkan tingkat tabungan dan suku bunga akan meningkat. Peningkatan suku bunga akan mendorong permintaan investasi swasta menurun, sehingga kaum Neoklasik menyimpulkan bahwa dalam kondisi kesempatan kerja penuh, defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan investasi swasta tergesur (*crowding-out*) (Samuelson, 1997). Para ekonom telah mengembangkan berbagai pemikiran dan teori yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap investasi swasta ini.

Gambar 2.6
Crowding Out



Sumber : Samuelson, Ekonomi: Jilid I, 1997, 469.

Berdasarkan Gambar 2.6 diatas bahwa aliran neoklasik mengklaim 100 persen defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan investasi swasta tergusur (*crowding-out*). Diasumsikan bahwa perekonomian mempunyai ciri-ciri paham Klasik dan Neoklasik. Kurva penawaran agregat (AS) adalah vertikal dan hanya uang yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya, kurva permintaan agregat (AD) tidak akan bergeser. Ini dikarenakan hanya uang yang dapat mempengaruhi pengeluaran total. Jika kebijakan fiskal tidak mempengaruhi permintaan, maka dampak dari kebijakan ini adalah penurunan investasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika kebijakan fiskal merangsang perekonomian, permintaan uang akan meningkat, dan apabila jumlah uang beredar tidak berubah, suku bunga akan meningkat, dan pada akhirnya suku

bunga akan meningkat secukupnya sedemikian rupa sehingga investasi turun sebesar jumlah dari kenaikan belanja pemerintah. Secara umum kaum Neoklasik berpendapat bahwa defisit anggaran dapat merugikan perekonomian (Samuelson, 1997).

2.3 Uang Beredar

Komponen uang beredar terdiri dari tiga jenis uang, yaitu uang kartal, uang giral dan uang kuasi.

Menurut Bank Indonesia dalam Solikin dan Suseno (2002), di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar, yaitu :

1. Uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*), yang sering disebut M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D).
2. Uang beredar dalam arti luas (*broad money*), yang disimbolkan M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D) dan uang kuasi (T). Dengan kata lain, M2 adalah M1 ditambah dengan tabungan dan simpanan berjangka lain yang jaraknya lebih pendek, termasuk rekening pasar uang dan pinjaman semalam antar bank.

2.3.1 Fungsi Uang

Sukirno (2006) membagi empat jenis fungsi uang sebagai berikut :

1. Fungsi uang sebagai alat tukar

Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan perekonomian yang bertransaksi dengan menggunakan barter. Sehingga uang yang dipakai pada masyarakat digunakan untuk bertransaksi mengganti sistem barter.

2. Fungsi uang sebagai satuan hitung

Penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Dalam hal ini yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang dengan adanya uang. Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

3. Fungsi uang sebagai pembayaran tertunda

Penggunaan uang sebagai alat pembayaran atau perantara dalam tukarmenukar dapat mendorong pembayarannya ditunda karena para pelaku ekonomi akan merasa yakin bahwa pembayarannya yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkan.

4. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai

Uang bisa digunakan sebagai alat penyimpanan nilai. Maksudnya adalah penggunaannya memungkinkan kekayaan orang disimpan dalam bentuk uang.

2.3.2 Teori Permintaan Uang dan Tingkat Harga

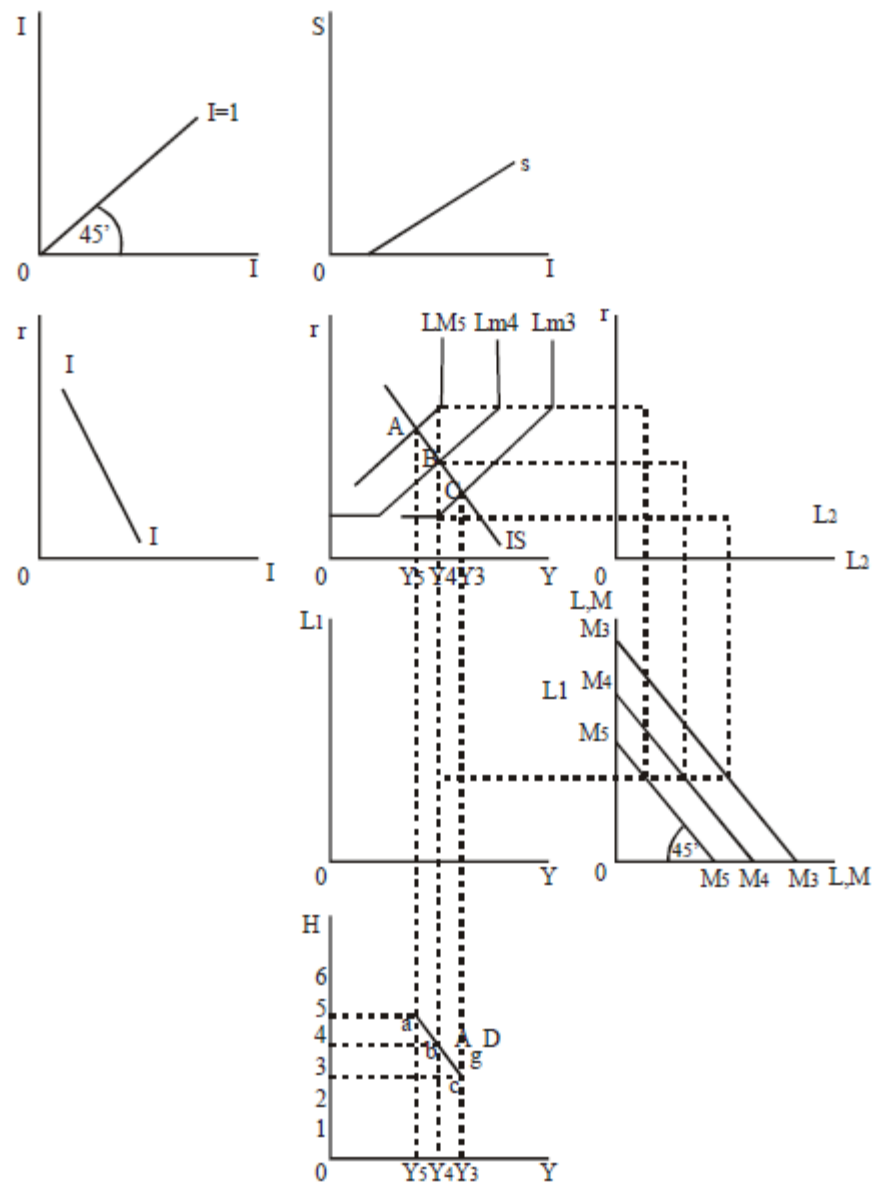
2.3.2.1 Keynes Effect

John Maynard Keynes melihat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional equilibrium melalui pengaruhnya terhadap *real moneysupply*, yang dapat pula disebut jumlah penawaran uang nyata. Dalam keadaan deflasi, yaitu di mana tingkat harga mengalami penurunan, nilai riil jumlah uang beredar akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah uang yang nilai nominalnya sama dalam arti tidak berubah, menurunnya tingkat harga dengan lima puluh persen, misalnya mengakibatkan meningkatnya *real money supply* menjadi dua kali jumlah semula. Sebaliknya, sebagai akibat adanya inflasi, dengan *nominal money supply* yang sama dihasilkan *real money supply* yang lebih sedikit daripada sebelumnya (Soediyono, 2000).

Pada gambar 2.7, mula-mula tingkat harga setinggi 5. Dengan $P = 5$, *real money supply* tergambar sebagai garis penawaran uang M_5M_5 . Dengan harga menurun menjadi $P = 4$, garis penawaran uang nyata bergeser ke M_4M_4 . Selanjutnya apabila tingkat harga menurun lagi ke $P = 3$, garis *real money supply* bergeser lagi ke M_3M_3 . Bergesernya garis *real supply* MM menjauhi titik sumbu silang 0 ini dengan sendirinya mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, dari LM_5 ke LM_4 kemudian ke LM_3 . Dengan bergesernya kurva-kurva LM ini, maka titik equilibrium IS-LM juga pindah, yaitu semula A, kemudian pindah ke B, lalu ke C (Soediyono, 2000). Dari uraian di atas, dapat dilihat hubungan antara tingkat harga dengan tingkat

pendapatan nasional yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar barang dan pasar uang.

Gambar 2.7
Keynes Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000.

2.3.2.2 Pigou Effect

Soediyono (2000) dalam bukunya menjelaskan bahwa A.C Pigou dalam artikelnya yang sangat terkenal: “*The Classical Stationary State*”, menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi suatu perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai riil saldo kas masyarakat, yang biasa disebut juga *real cash balance*. Oleh karena itulah, kiranya mudah dipahami kalau konsepnya tersebut terkenal dengan sebutan *Pigou real cash balance effect*, yang biasa juga hanya disingkat *Pigou Effect*.

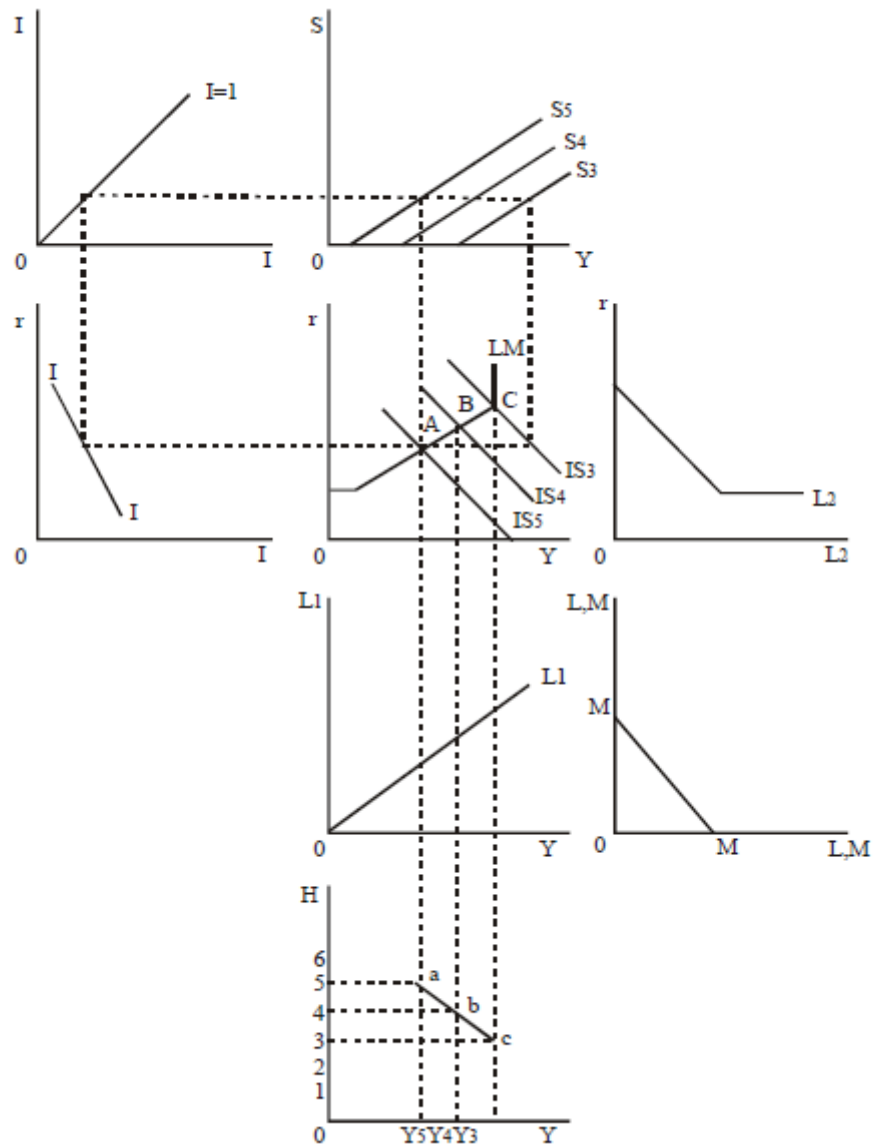
Dengan menurunnya tingkat harga, nilai riil saldo kas seseorang meningkat. Meningkatnya nilai riil saldo kas menyebabkan saldo kas yang semula berada dalam keadaan *ekuilibrium* oleh rumah tangga pemiliknya terasa terlalu banyak. Terjadilah sekarang keadaan *disekuilibrium* pada diri konsumen atau rumah tangga tersebut. Mereka ingin mengurangi saldo kasnya sampai pada jumlah yang optimal. Untuk maksud ini mereka akan menambah besarnya pengeluaran konsumsi (Soediyono, 2000).

Meningkatnya pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan yang sama secara grafik tercermin oleh bergesernya kurva atau garis konsumsi menjauhi sumbu pendapatan nasional. Ini berarti juga bahwa kurva atau garis *saving* bergeser mendekati ke sumbu pendapatan nasional. Atau lebih jelasnya variabel C_0 nilainya meningkat dan nilai S_0 menurun. Menurunnya nilai S_0 pada gambar 2.8 terungkap

dalam bentuk bergesernya garis *saving*, misalnya dari S_5 ke S_4 , lalu ke S_3 (Soediyono, 2000).

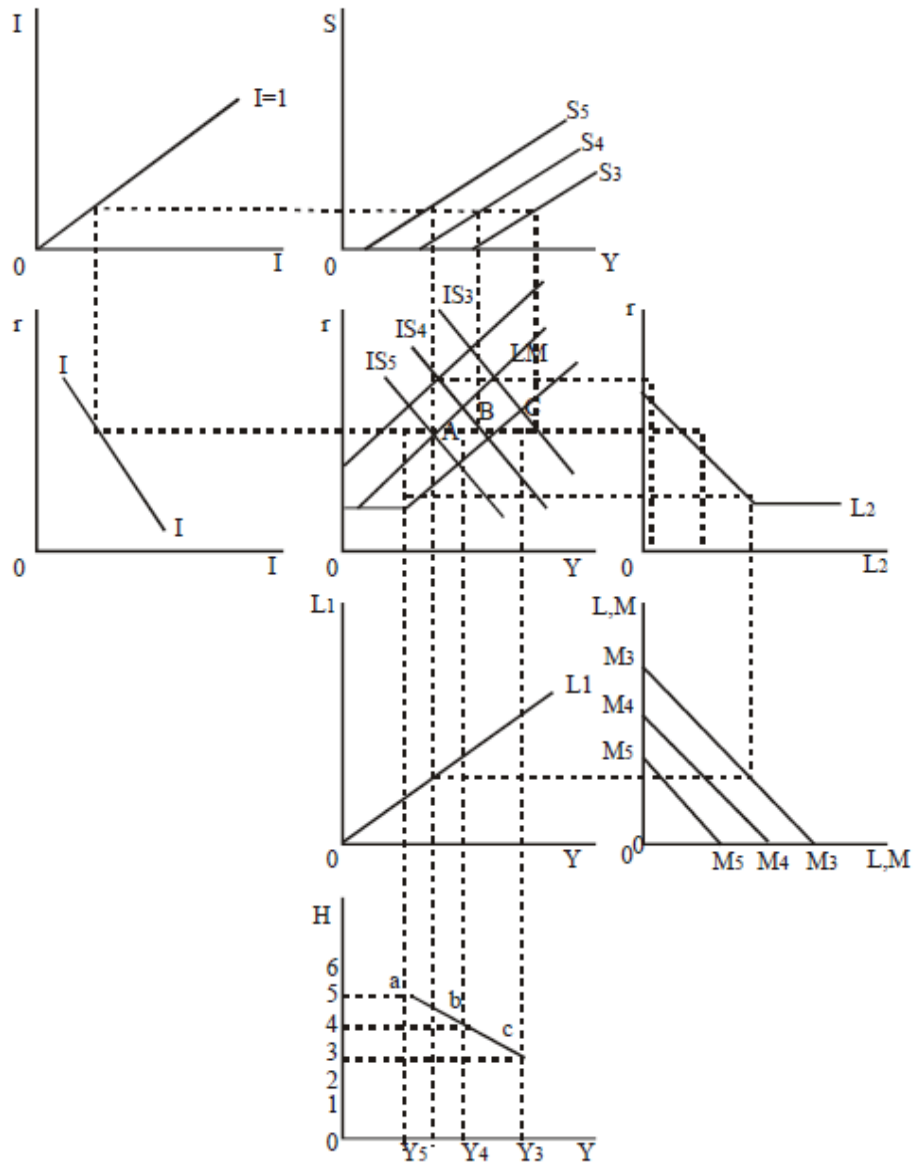
Bergesernya garis *saving* tersebut dengan sendirinya akan mengakibatkan bergesernya kurva IS, dari semula IS_5 bergeser ke IS_4 , lalu ke IS_3 . Bergesernya kurva IS ini selanjutnya mengakibatkan pindahnya titik *ekuilibrium* IS-LM dari semula A, ke B, lalu ke C. Dengan pindahnya titik *ekuilibrium* IS-LM ini berarti tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium* juga berubah dari semula OY_5 , menjadi OY_4 , kemudian berubah lagi menjadi OY_3 . Secara grafik kurva permintaan agregat pada gambar 2.8 berhasil diturunkan dari kuadran IS-LM. Hasilnya adalah kurva abc pada kuadran tengah paling bawah.

Gambar 2.8
Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000.

Gambar 2.9
Keynes Effect, Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat

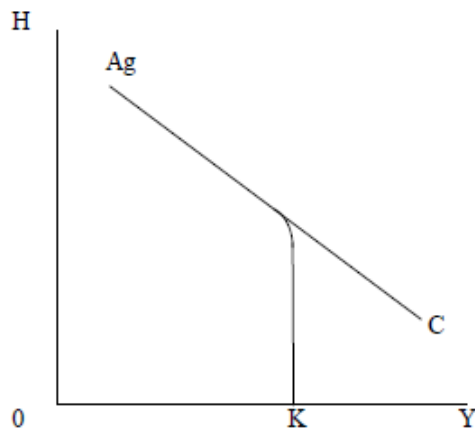


Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000.

2.3.2.3 Bentuk Kurva Permintaan Agregat

Dapat dipahami bahwa kurva permintaan agregat bentuknya dipengaruhi oleh bentukkurva-kurva yang merupakan unsur daripada kurva permintaan agregat tersebut. Dengan demikian, dapat dibedakan antara bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi klasik dengan bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi Keynes.

Gambar 2.10
Bentuk Kurva Permintaan Agregatif:
Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes



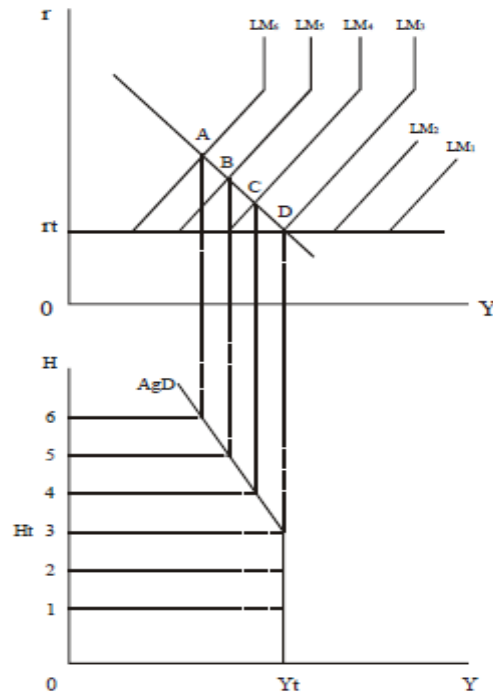
Sumber : Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000.

Berdasarkan gambar 2.10 diatas, agDC merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik, sedangkan agDK merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi Keynes. Sebagai konsekuensi dipergunakannya asumsi adanya jerat likuiditas atau *liquidity trap* dan atau inelastik sepenuhnya kurva permintaan investasi agregat pada bagian sebelah kanan kurva tersebut, maka kurva permintaan agregat dengan

asumsi Keynes pada tingkat-tingkat harga yang tinggi bentuknya sama dengan bentuk yang dimiliki oleh kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik. Tetapi mulai tingkat harga dengan kerendahan tertentu kurva permintaan agregat Keynes menurun lebih cepat dan bahkan akhirnya dapat sejajar dengan sumbu tingkat harga.

Sebaliknya dengan menggunakan asumsi-asumsi Klasik, yang boleh dikatakan tidak mengakui kemungkinan adanya *liquidity trap* dan fungsi permintaan Investasi dengan elastisitas yang sangat rendah, dihasilkan kurva permintaan agregat yang bentuknya seperti terlihat pada gambar 2.11, sebagai kurva agDC.

Gambar 2.11
Bentuk Kurva Permintaan Agregatif
dengan Adanya Jerat Likuiditas



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000.

Mengenai bagaimana *liquidity trap* menghasilkan kurva permintaan agregat yang inelastis sempurna dapat diuraikan dengan menggunakan gambar 2.11. Bekerjanya *Keynes effect* menggeser kurva LM ke kanan. Dalam contoh sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari 6 ke 5, kemudian ke 4, dan seterusnya, kurva LM bergeser dari semula LM_6 ke LM_5 , lalu ke LM_4 , dan seterusnya. Ini selanjutnya mengakibatkan titik ekuilibrium IS-LM pindah dari A ke B, kemudian ke C dan seterusnya.

Sekalipun kurva LM terus bergeser ke kanan sebagai akibat bekerjanya *Keynes effect*, namun sebagai akibatnya adanya *liquidity trap*, bergesernya titik ekuilibrium IS-LM akan "terjerat" pada titik D oleh jerat likuiditas atau *liquidity trap* tersebut. Dengan terjeratnya titik ekuilibrium IS-LM pada titik D, tingkat bunga tidak akan menurun lebih rendah daripada Or_t , dan tingkat pendapatan nasional tidak akan melampaui Oy_t . Selanjutnya hal ini mempunyai makna bahwa mulai dari tingkat harga 3 turun ke bawah, kurva permintaan agregat bergerak sejajar dengan sumbu harga.

2.4 Kebijakan Moneter

2.4.1 Defenisi Kebijakan Moneter

Sukirno (1994) menjelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Kebijakan moneter ini merupakan tindakan penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang yang

berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Jika keadaan ini terus berlangsung, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi inilah yang melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang beredar di perekonomian melalui kebijakan moneter (Sukirno, 1994).

2.4.2 Instrumen Kebijakan Moneter

Karim (2002) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan berbagai kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrumen atau alat utama, yaitu:

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Untuk keperluan operasi terbuka, sejak Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI merupakan instrumen moneter tidak langsung yang dilakukan Bank Sentral untuk menyedot kelebihan likuiditas perbankan jika kondisi moneter terlalu ekspansif. Operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang penting karena dapat mempengaruhi suku bunga ataupun jumlah uang beredar secara lebih efektif. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Selain itu,

operasi pasar terbuka juga dapat dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dengan frekuensi dan kuantitas sesuai yang diinginkannya (Karim, 2002).

Operasi pasar terbuka berbentuk jual beli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang maupun non lelang. Jika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar (kebijakan uang ketat atau *tight money policy*) atau dengan kata lain menekan laju inflasi, maka pemerintah menarik jumlah uang beredar dari masyarakat dengan jalan membuat masyarakat semakin banyak membeli SBI. Cara yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat membeli SBI adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga SBI oleh Bank Indonesia. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia dapat menarik SBI yang berada di masyarakat dengan cara membelinya. Agar semakin banyak SBI yang dijual oleh masyarakat, maka Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga SBI dan ini akan mendorong laju inflasi (Karim, 2002).

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Untuk membantu bank umum yang mengalami kesulitan dana dalam rangka ekspansi kredit, bank sentral dapat memberikan pinjaman. Pinjaman oleh bank sentral kepada bank umum tersebut disebut juga fasilitas diskonto atau tingkat diskonto. Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank sentral kepada bank-bank umum dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Dimana tingkat diskonto disini adalah tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank sentral

kepada bank umum apabila mengalami kekurangan dana. Keadaan inilah yang digunakan pemerintah didalam mengendalikan jumlah uang beredar (Karim, 2002).

Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank umum untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar dan dapat melakukan ekspansi kredit sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya jika ingin menambah laju pertumbuhan jumlah uang beredar, maka pemerintah menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar dapat ditekan yang berarti juga menekan laju inflasi (Karim, 2002).

3. Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement*)

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank dan disebut cadangan primer (*primary reserves*). Cadangan primer atau yang lebih dikenal dengan *reserve requirement* adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Sebagian alat likuid tersebut ada yang harus dipelihara dalam bentuk kas dan ada sebagian lainnya dalam bentuk rekening giro bank tersebut pada bank sentral (Karim, 2002).

Cadangan primer ini termasuk instrumen tidak langsung karena pada satu sisi akan mempengaruhi kemampuan bank memberikan kredit dan pada sisi lain tingkat

suku bunga. Meskipun merupakan instrumen tidak langsung, cadangan primer ini adalah jenis instrumen yang bersifat *non-market based* karena jumlah cadangan primer ditentukan oleh bank sentral (Karim, 2002).

Giro wajib minimum yaitu suatu peraturan dari bank sentral kepada bank-bank umum dengan menentukan besar kecilnya tingkat cadangan minimum (*reserve requirement*). Apabila bank sentral menaikkan cadangan minimum bank-bank umum akan mengakibatkan berkurangnya ekspansi pemberian kredit oleh bank-bank umum kepada masyarakat. Hal ini akan mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat secara berangsur-angsur dan dapat juga berarti menekan inflasi. Sebaliknya apabila bank sentral menurunkan giro wajib minimum maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah (Karim, 2002).

4. Imbauan Moral (*Moral Suasion*)

Bank sentral dapat menggunakan imbauan moral (*moral suasion*) untuk mendorong institusi finansial agar membela kepentingan *public*. Biasanya, mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi finansial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya (Karim, 2002).

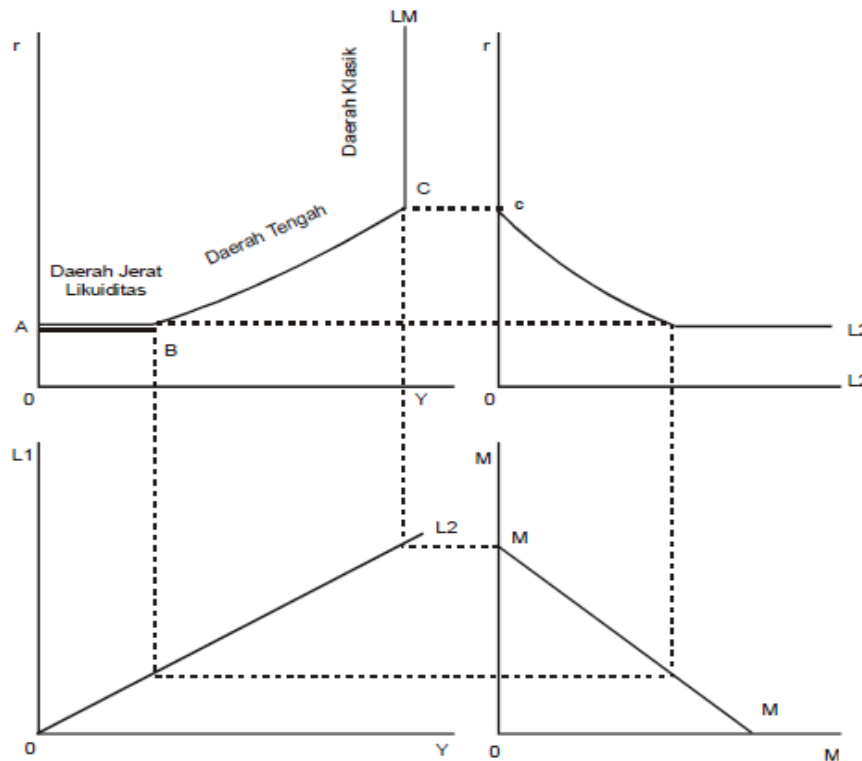
2.4.3 Keefektifan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Soediyono (2000) menjelaskan bahwa tidak sulit untuk dipahami kalau bentuk kurva IS dan kurva LM besar pengaruhnyaterhadap keefektifan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Semakin datar bentuk kurva IS, semakin efektif kebijaksanaan

moneter. Di lain pihak, semakin datar kurva LM, kebijakan fiskal yang efektif. Dengan bentuk standar kurva permintaan akan uang untuk spekulasi, L_2 , yang tergambar pada kuadran barat laut, yang selanjutnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yang masing-masing dengan sebutan, sebagai berikut:

1. Daerah Klasik atau *Classical Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang sejajar dengan sumbu tingkat bunga. Disebut sebagai daerah Klasik, disebabkan daerah inilah yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan teoritik seperti yang dihasilkan oleh para pemikir ekonomi Klasik.
2. Daerah Jerat Likuiditas atau *Liquidity Trap Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang sejajar dengan sumbu pendapatan nasional nyata.
3. Daerah Tengah atau *Intermediate Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang beradadi antara daerah Klasik dan daerah Jerat Likuiditas.

Gambar 2.12
Bentuk Standar Kurva L2 dan Kurva LM



Sumber: Soediyono, Pengantar Ekonomi Makro Edisi ke Enam, 2000, 281.

2.4.3.1 Kebijakan Fiskal

Masalah efektifitas kebijakan fiskal seperti yang terlihat pada gambar 2.13 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Di daerah Jerat Likuiditas, kebijakan fiskal paling efektif. Dengan menggeserkan kurva IS ke kanan sejauh ab , pendapatan nasional *ekuilibrium* meningkat sebesar ab , yaitu semula O_{ya} , sekarang menjadi O_{yb} .
2. Di daerah tengah, kebijakan fiskal juga dapat menaikkan tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium*, akan tetapi tidak dapat efektif di daerah Jerat Likuiditas.

Kebijakanfiskal yang berhasil menggeser kurva IS ke kanan sejauh cd ,n yang jaraknya samadengan ab , menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan nasional kurang dari cd ,yaitu hanya meningkat dari semula O_{yc} menjadi O_{ym} .

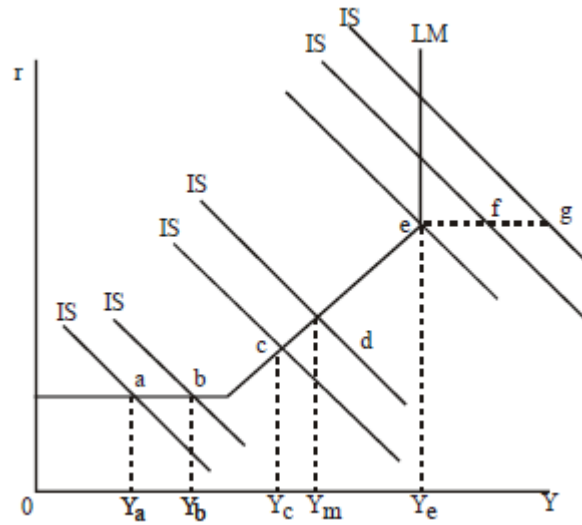
3. Di daerah Klasik, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif. Kebijakan fiskal yangberhasil menggeser kurva IS sejauh ef , eg ataupun lebih besar lagi, pendapatannasional *ekuilibrium* sama sekali tidak meningkat, yaitu tetap sebesar O_{ye} .

2.4.3.2 Kebijakan Moneter

Dengan kebijakan moneter yang berhasil menggeser kurva LM dari LM_0 ke LM_1 dengan titik ekuilibrium IS-LM yang beradapada :

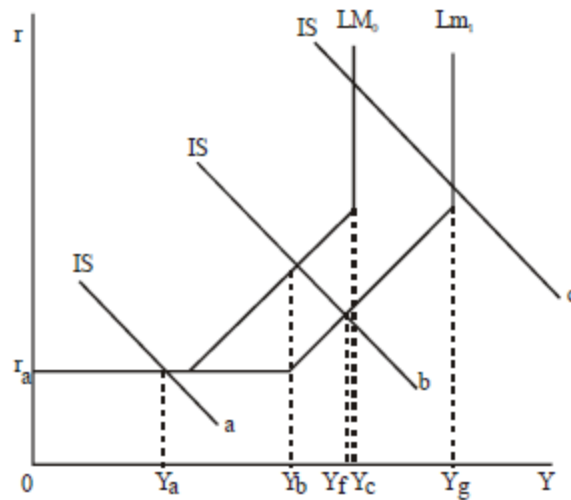
1. Di daerah Jerat Likuiditas, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif. Sama sekalitidak berhasil menaikkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium.
2. Di daerah tengah, kebijakan moneter mampu menaikkan tingkat pendapatan nasionalekuilibrium, akan btetapi tidak seefektif di daerah Klasik.
3. Di daerah Klasik, kebijakan moneter adalah paling efektif. Dengan peningkatanjumlah uang beredar yang sama, kalau titik ekuilibrium IS-LM berada di daerahtengah, bertambah besarnya pendapatan nasional ekuilibrium hanya sebesar $Y_b Y_f$, sedangkan apabila titik ekuilibrium IS-LM berada di daerah Klasik, tambahanpendapatan nasional ekuilibrium yang dihasilkan akan sebesar $Y_c Y_g$, selanjutnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.13
Kebijakan Fiskal



Sumber : Soediyono, Pengantar Ekonomi Makro Edisi ke Enam, 2000, 283.

Gambar 2.14
Kebijakan Moneter



Sumber : Soediyono, Pengantar ekonomi Makro Edisi ke Enam, 2000, 283.

2.5 Hubungan Antara Masing-Masing Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.5.1 Hubungan Defisit Anggaran dengan Tingkat Inflasi di Indonesia.

Defisit anggaran adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Menurut Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal pada suatu negara sebagian besar membutuhkan kondisi defisit atau surplus pada anggarannya karena setidaknya ada tiga alasan, yaitu alat stabilisasi, *tax smoothing* dan redistribusi intergenerasi. Pada umumnya, negara berkembang dan maju mengadopsi kebijakan defisit anggaran yang sering disebabkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat, melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat krisis global, dan pengeluaran berlebih karena inflasi.

Akibat dari kenaikan pengeluaran pemerintah, maka terjadi kenaikan tingkat pendapatan yang akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output. Kenaikan tingkat harga dan output akan menyebabkan terjadinya inflasi di dalam negeri meningkat. Selain itu kenaikan dalam permintaan uang (jumlah uang beredar atau *money supply*) juga akan mempertinggi laju inflasi (Mankiw, 2003).

Sejalan dengan penelitian Teguh (2008) bahwa defisit anggaran akan berpengaruh terhadap kenaikan PDB sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi dengan kenaikan laju inflasi.

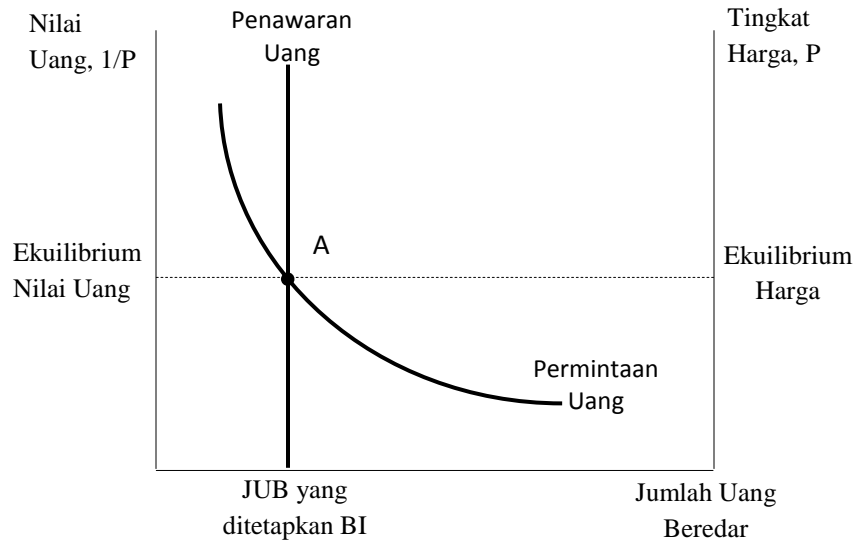
2.5.2 Hubungan Uang Beredar dengan Tingkat Inflasi di Indonesia.

Uang beredar dalam arti luas (M2) merupakan gambaran liquiditas perekonomian. M2 merupakan penjumlahan dari M1 dan Uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang tidak diedarkan yang terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik (Solikin dan Suseno, 2002).

Menurut Mankiw (2006) menyatakan bahwa nilai uang ditentukan oleh *supply* dan *demand* terhadap uang. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, sementara jumlah uang yang diminta (*money demand*) ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah uang yang diminta.

Gambar 2.15

Hubungan antara *Supply* dan *Demand* terhadap Uang dan Tingkat Harga



Sumber : Mankiw, *Principles of Macroeconomics* : edisi 3, 2006, 343.

Berdasarkan Gambar 2.15 diatas menggambarkan hubungan antara *supply* dan *demand* terhadap uang. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah uang beredar, sumbu vertikal kirimenggambarkan nilai uang, $1/P$, dan sumbu vertikal kanan menggambarkan tingkat harga, P . Sumbu-sumbu vertikal menggambarkan bahwa saat nilai uang tinggi, maka tingkat harga akan rendah, dan sebaliknya pada tingkat harga yang tinggi maka nilai uang akan rendah. Kedua kurva menggambarkan *supply* dan *demand* terhadap uang. Kurva *supply* berbentuk vertikal karena jumlah uang beredar ditetapkan oleh Bank Sentral. Kurva *demand* memiliki *slope* negatif, mengindikasikan bahwa saat nilai uang rendah dan tingkat harga tinggi, maka permintaan terhadap uang akan tinggi. Pada titik ekuilibrium, A, jumlah uang yang diedarkan dan jumlah uang

yang dimintamasyarakat berada dalam keseimbangan. Ekuilibrium antara *supply* dan *demand* terhadap uang menentukan nilai uang dan tingkat harga barang dan jasa.

Dornbusch dan Fischer (1997) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi rendah. Dengan demikian, inflasi merupakan fenomena moneter mengandung arti bahwa laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Langi dkk (2014) yang menemukan bukti kuat bahwa hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi memiliki sifat korelasi positif dimana jika ada peningkatan dalam jumlah uang beredar maka akan meningkatkan tingkat inflasi sebaliknya jika ada penurunan dalam jumlah uang beredar maka akan menurunkan tingkat inflasi.

Peningkatan jumlah uang yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Jika hal ini terus-menerus terjadi, kemamakmuran masyarakat secara keseluruhan pada akhirnya akan mengalami penurunan (Suseno dan Solikin, 2002).

2.5.3 Hubungan PDB dengan Tingkat Inflasi di Indonesia.

Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2004). Ada tiga pendekatan dalam menghitung produk domestik bruto suatu negara, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Produk domestik bruto dapat menggambarkan pendapatan nasional suatu negara. Sukirno (1994) dalam bukunya menyatakan bahwa dengan tingkat pendapatan yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh penyebab inflasi dari sisi tarikan permintaan (*demand full inflation*). Kenaikan permintaan agregat (*aggregat demand*) yang tidak diimbangi dari sisi penawaran (*aggregat supply*) akan menimbulkan celah inflasi (*inflationary gap*) yang merupakan sumber inflasi.

Setiawan (2008) menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan inflasi, tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi (*the short run Philips curve*),
2. *Rational economi agent* mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan *time-consistency*,

3. Kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi memakan waktu yang panjang dan mempunyai *lag*,
4. Kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi.

Penetapan stabilitas harga tersebut akan mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun demikian, disisi lain pencapaian kebijakan moneter yang tidak dilakukan secara terukur juga dapat mengakibatkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tingkat inflasi di Indonesia dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diringkas dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	An Empirical Analysis of Fiscal Deficit and Inflation in Ngeria (Ezeabasilidkk, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Inflation • Money Supply • GDP • Fiscal Defisit • Exchange rate Depreciation 	Analisis Vector Error Corretion Model	Ada hubunagn positif antara tingkat inflasi terhadap defisit fiskal tetapi tidak signifikan secara statistik. Dalam jangka panjang, ada pengaruh antara uang beerdar terhadap inflasi di Nigeria.
2	Analisis Interpendensi Neraca Transaksi Berjalan-Neraca Modal Indonesia Pendekatan Model VAR dan VECM 1981.1-2002.3 (Kurnia, 2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca Transaksi Berjalan • Neraca Modal 	Analisis Vector Autogressive dan Vector Error Correction Model	Ada hubungan interdependensi anatar neraca traksaksi berjalan dengan neraca modal Indonesia. Dalam jangka pendek, keduanya saling mempengaruhi tetapi dalam jangka panjang keduanya saling independen dan mempengaruhi. Pengaruh tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan eksternal Indonesia.
3	Analisis Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Tingkat Inflasi Dengan Pendekatan <i>Scaled Base Money</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan <i>Real Income</i> • Tingkat Inflasi • Defisit Anggaran • Uang Primer • dummy 	Analisis Error Correction Model	Dengan pendekatan <i>Scaled Base Money</i> bahwa dalam jangka panjang yang mempengaruhi tingkat inflasi itu adalah variabel innflasi itu sendiri. Variabel dummy tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi

	(Setiawan, 2008)			inflasi.
4	Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (1993-2007) (Pramuji, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi Rumah Tangga • Konsumsi pemerintah • Pendapatan <i>disposibel</i> • PDB • Penerimaan pajak • Penerimaan non pajak • Penerimaan pemerintah • Investasi • Ekspor • Impor • <i>Money supply</i> dan <i>money demand</i> • Belanja pemerintah • Suku bunga domestic • Kurs Dollar Terhadap Rupiah • Defisit anggaran • Inflasi dalam negeri • Angka pengganda uang • Uang primer • Cadangan minimum • Pembayaran cicilan utang luar negeri • Utang pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Metode analisis 2SLS b. Uji asumsi klasik c. Uji statistik Identifikasi 	<p>Hasil analisis Defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat <i>inflationary</i>. Dimana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar, yang akan berpengaruh pada peningkatan tingkat harga atau inflasi.</p>

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh defisit anggaran, uang beredar, PDB terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Sukirno (2000) mendefinisikan inflasi adalah presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai suatu ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Boediono (1988) inflasi disebabkan karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya inflasi di Indonesia, antara lain melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen defisit anggaran. Menurut Teori Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, dan konsumsi pada giliran berikutnya. Akibat dari kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut, maka terjadi kenaikan tingkat pendapatan yang akan mendorong kenaikan tingkat harga dan output. Kenaikan tingkat harga dan output akan menyebabkan terjadinya inflasi di dalam negeri meningkat. Selain itu kenaikan permintaan uang (jumlah uang beredar atau *money supply*) juga akan mempertinggi laju inflasi (Mankiw, 2003).

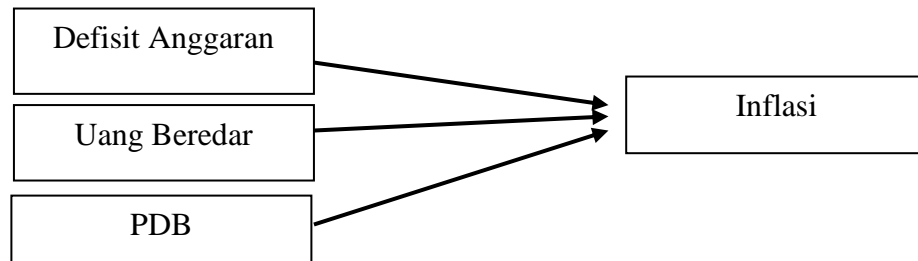
Uang beredar dalam arti luas (M2) berpengaruh terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan oleh teori kuantitas Fisher ($M.V = P.T$). Dalam teori tersebut, Fisher menyatakan inflasi erat kaitannya dengan uang beredar. Jika terjadi kenaikan jumlah uang beredar, maka akan mestimulus terjadinya inflasi, dengan asumsi kecepatan jumlah uang beredar dan volume produksi perekonomian yang bersifat konstan.

Angraini (2012) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga (inflasi tinggi) melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, PDB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat di negara tersebut, dengan pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa. Berdasarkan sebab-sebab inflasi, dari sisi tarikan permintaan (*demand full inflation*). Kenaikan permintaan agregat (*agregat demand*) yang tidak diimbangi dari sisi penawaran (*agregat supply*) akan menimbulkan celah inflasi (*inflationary gap*) yang merupakan sumber inflasi (Sukirno, 1994). Selain itu, menurut Teori Keynesian kenaikan PDB dari sisi pengeluaran akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Bila jumlah permintaan efektif terhadap komoditas meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul dan menimbulkan masalah inflasi (Nugroho, 2012).

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka skema hubungan antar variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 2.16 berikut:

Gambar 2.16
Hubungan antar Variabel dalam Kerangka Pemikiran Teoritis



2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian dimana memerlukan data untuk diuji secara empiris kebenaran dugaan tersebut (Kountur, 2004). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga variabel defisit anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2001.1–2013.4. Semakin tinggi defisit anggaran suatu negara, maka tingkat inflasi di negara tersebut akan meningkat.
2. Diduga variabel uang beredar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2001.1–2013.4. Semakin tinggi uang beredar suatu negara, maka tingkat inflasi di negara tersebut akan meningkat.
3. Diduga variabel PDB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2001.1–2013.4. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka tingkat inflasi di negara tersebut juga akan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu defisit anggaran, uang beredar, PDB dan inflasi. Selain itu, dijelaskan juga jenis data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan mengamati empat variabel endogen yaitu tingkat inflasi, defisit anggaran, uang beredar dan PDB di Indonesia selama kurun waktu 2001.1–2013.4.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Inflasi (INF)

Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa-jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) kuartal yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dengan satuan persen (%) selama kurun waktu 2001.1 – 2013.4.

2. Defisit Anggaran (DF)

Defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja pemerintah, selama satu periode pelaporan. Dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia berupa data *time series* kuartalan selama kurun waktu 2001.1 – 2013.4.

3. Jumlah Uang Beredar (M2)

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) merupakan gambaran likuiditas perekonomian. M2 merupakan penjumlahan dari M1 dan tabungan serta deposito berjangka (*time deposits*). Dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia berupa data *time series* kuartalan selama kurun waktu 2001.1–2013.4.

4. PDB

Adalah output riil suatu perekonomian. Dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah, data yang digunakan adalah data PDB riil Indonesia harga konstan tahun 2000, yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia berupa data *time series* kuartalan selama kurun waktu 2001.1–2013.4.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2003), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* yaitu data defisit anggaran, uang

beredar, PDB riil, dan inflasi berupa data kuartalan dari tahun 2001.1 hingga 2013.4. Alasan pemilihan data kuartalan dari tahun 2001.1 hingga 2013.4 didasarkan karena keterbatasan data, sehingga di pilih data kuartalan dari periode 2001.1 hingga 2013.4.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, serta sumber lain yang relevan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dari berbagai laporan, literatur-literatur, penelitian, dan dokumentasi secara resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Kebijakan Fiskal, serta sumber lain yang relevan.

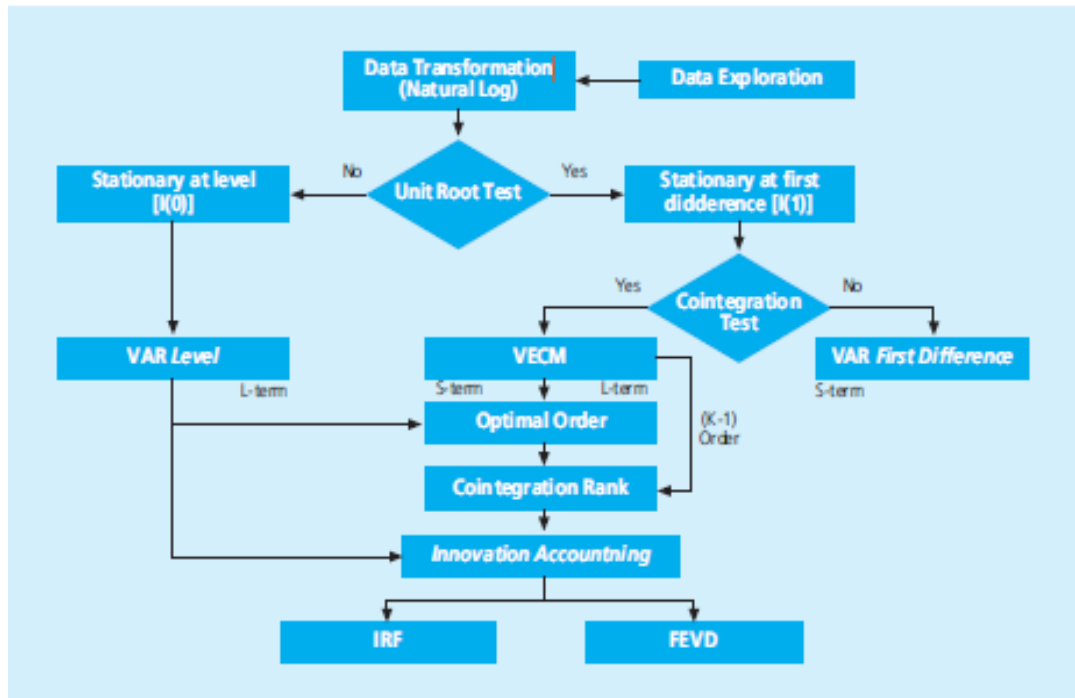
3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya).

3.4.1 Proses Pegujian Analisis

Untuk menguji model empiris sebagaimana disebutkan dalam kerangka pemikiran teoritis, digunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Proses analisis menggunakan pendekatan VECM digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 3.1
Proses Analisis VECM



Sumber : Ascarya, 2009.

Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, langkah pertama untuk melakukan suatu analisis data dalam model VECM (Gustiani dkk, 2010) sebagai berikut :

1. Mengekspolarasi data. Tujuan ekspolarasi data adalah mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dari suatu model dan berusaha untuk mencari cara penyelesaiannya.
2. Transformasi data. Merupakan suatu proses dalam merubah bentuk data. Semua data dalam penelitian ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln) kecuali variabel inflasi dan defisit anggaran dalam bentuk persentase.

3. *Unit root test*. Uji stasioneritas yang populer digunakan adalah *Unit Root Test*. Hasil Pengujian stasioneritas data adalah pengujian untuk menguji apakah variasi dari data pada penelitian bersifat konstan atau tidak. Suatu data dapat dikatakan baik adalah ketika data tersebut memiliki sifat stasioner artinya nilai rata-rata dan variansnya konstan. Pengujian stasioneritas data dapat dilakukan dengan melakukan pada tingka *level* terlebihdahulu, lalu jika tidak stasioner dilanjutkan pada tingkat *first difference* dan jika tidak stationer lagi maka dilanjutkan pada tingkat *second difference*.
4. Penentuan panjang *lag*. Sebelum melakukan uji kointegrasi perlu dilakukan penentuan panjang lag. Karena uji kointegrasi sangat peka terhadap panjang lag, maka penentuan lag yang optimal menjadi salah satu prosedur penting yang harus dilakukan dalam pembentukan model.
5. Uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel penelitian memiliki hubungan jangka panjang. Adapun syarat hasil pengujian dikatakan memiliki hubungan kointegrasi ialah jika nilai *Trace Statistic* > *Critical value*.
6. *Vector Error Correction Model* (VECM) jika data yang digunakan adalah stationer pada perbedaan pertama namun terdapat kointegrasi.
7. *Innovation Accounting*. Tujuan *innovation accounting* adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh *shock* atau *impulse* terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam persamaan.

8. Analisis *impulse response function* juga dilakukan untuk melihat respon suatu variabel endogen terhadap guncangan variabel lain dalam model.
9. Analisis *variance decomposititon* juga dilakukan untuk melihat kontribusi relatif suatu variabel dalam menjelaskan variabilitas variabel endogenusya.

3.4.2 Spesifikasi Model Penelitian

Spesifikasi model dalam penelitian ini adalah modifikasi model yang digunakan oleh Ezeabasili dkk (2012). Metode yang digunakan adalah metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Model VECM digunakan jika suatu data *time series* yang tidak stasioner dari model VAR telah terbukti terdapat hubungan kointegrasi. VECM digunakan untuk mengetahui perilaku jangka pendek terhadap nilai jangka panjangnya. Shochrul dkk (2011) menjelaskan bahwa VECM juga digunakan untuk menghitung hubungan jangka pendek antar variabel melalui koefisien standar dan mengestimasi hubungan jangka panjang dengan menggunakan lag residual dari regresi yang terkointegrasi. yang mempunyai syarat adanya kointegrasi antar variabel.

Definisi kointegrasi menurut Engle-Granger (1987) adalah suatu kondisi dimana adanya kombinasi linier dari variabel-variabel yang tidak stationer pada data asli (*level series*) mempunyai residual yang stasioner. Variabel-variabel yang terkointegrasi tersebut akan dikatakan mempunyai suatu keseimbangan jangka panjang jika disesuaikan pada mekanisme koreksi kesalahan (*Error Correction Mechanism*).

Hoffman dan Rasche (1997) dalam Shochrul dkk (2011) menjelaskan tentang model estimasi VECM dengan data time series x_t vector ($p \times 1$) terkointegrasi pada tiap komponennya dalam bentuk persamaan :

$$\Delta x_t = \mu + \alpha \beta' x_{t-1} + \sum_{i=1}^k \Gamma_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana :

- Γ_j = koefisien matriks ($p \times p$); $j = 1, \dots, k$
- μ = vektor ($p \times 1$) yang meliputi seluruh komponen determinan dalam sistem.
- α, β = matriks ($p \times r$); $0 < r < p$ dan r adalah jumlah kombinasi linier elemen x_t yang hanya dipengaruhi oleh *shock* transitor.
- $\beta' x_{t-1}$ = *error correction term*, yaitu jumlah pemberat pembalik rata-rata pada vektor kointegrasi pada data ke $t-1$.

Model dasar persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$INF_t = f(DF, M2, PDB) \dots \dots \dots (3.2)$$

Model dasar (3.2) diatas diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut :

$$INF_t = \alpha_0 + \alpha_1 DF_t + \alpha_2 \ln M2_t + \alpha_3 \ln PDB_t + \epsilon_t \dots \dots \dots (3.3)$$

Model empiris penelitian ini menggunakan *multivariate vector error correction* (VECM), spesifikasi dalam model ini adalah :

$$INF_t = \alpha_1 + \sum_{k=1}^p \beta_{1j} \Delta INF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{1j} \Delta DF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{1j} \ln \Delta M2_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{1j} \ln \Delta PDB_{t-j} + \epsilon_{1t} \dots \dots \dots (3.4)$$

$$DF_t = \alpha_2 + \sum_{k=1}^p \beta_{2j} \Delta DF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{2j} \Delta INF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{2j} \ln \Delta M2_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{2j} \ln \Delta PDB_{t-j} + \epsilon_{2t} \dots \dots \dots (3.5)$$

$$M2_t = \alpha_3 + \sum_{k=1}^p \beta_{3j} \ln \Delta M2_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{3j} INF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{3j} \ln \Delta DF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{3j} \ln \Delta PDB_{t-j} + \epsilon_{3t} \dots \dots \dots (3.6)$$

$$PDB_t = \alpha_4 + \sum_{k=1}^p \beta_{4j} \text{Ln}\Delta PDB_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{4j} \text{INF}_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{4j} \text{Ln}\Delta DF_{t-j} + \sum_{k=1}^p \phi_{4j} \text{Ln}\Delta M2_{t-j} + \epsilon_{4t} \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana :

INF	: Inflasi
DF	: Defisit Anggaran
M2	: Uang Beredar
PDB	: PDB riil
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: Koefisien regresi
$\epsilon_{1t}, \epsilon_{2t}, \epsilon_{3t}, \epsilon_{4t}$: Error term
t	: Kuartal
j	: Jumlah lag (kelambanan) kuartal yang diperoleh berdasarkan

estimasi $\epsilon_{1t} \epsilon_{2t} \epsilon_{3t} \epsilon_{4t}$ merupakan proses *white noise* (independen terhadap perilaku historis INF, DF, M2 dan PDB).

Persamaan (3.4), (3.5), (3.6), dan (3.7) selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk VAR menjadi:

$$x_t = A_0 + A_i x_{t-1} + e_t$$

di mana x_t merupakan vektor ($n \times 1$) variabel observasi (INF, DF, M2, PDB); A_0 adalah vektor ($n \times 1$) *intercept*; A_i adalah matriks ($n \times n$) koefisien; e_t adalah vektor ($n \times 1$) *error term*.

Analisis data secara kuantitatif dengan pendekatan model VAR, khususnya model VECM mencakup alat analisis utama yaitu *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. Sebelum sampai pada analisis VAR atau VECM ada beberapa prosedur estimasi yang akan digunakan dalam studi ini, yaitu terdiri dari: (1). Uji akar-akar unit (*unit root test*), (2). Penentuan Panjang Lag, dan (3). Uji Kointegrasi (*Johansen Cointegration Test*).

3.5 Analisis Data

3.5.1 Uji Stasioneritas

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, langkah pertama dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah melakukan uji stasioneritas data. Stasioneritas suatu data sangatlah penting dalam penggunaan analisis data yang berbentuk *time series*. Suatu variabel dikatakan stasioner jika nilai rata-rata dan variansnya konstan sepanjang waktu dan nilai kovarians antara dua periode waktu hanya tergantung pada selisih atau selang antara dua periode waktu tersebut bukan waktu sebenarnya ketika kovarian tersebut dihitung (Gujarati, 2003). Kondisi ini biasanya diikuti oleh nilai residualnya yang terdistribusi normal dengan rata-rata di titik nol dan standar deviasi tertentu (*white noise*).

Stasioneritas dari sebuah variabel menjadi penting karena pengaruhnya pada hasil estimasi regresi. Apabila dalam suatu runtun waktu ada data yang tidak stasioner, maka hasil regresi akan menyebabkan regresi palsu (*spurious regression*) atau regresi tanpa memiliki arti (*nonsense regression*), seperti yang dikemukakan oleh Yule (Gujarati, 2012)

Meresikan suatu variabel runtun waktu terhadap variabel runtun waktu lainnya kadangkala menghasilkan R^2 yang tinggi meskipun tidak ada hubungannya yang cukup berarti antara keduanya. Regresi antara variabel-variabel yang tidak stasioner tersebut akan menghasilkan fenomena regresi palsu (*spurious regression*) (Gujarati, 2012). Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur

besar kontribusi dari variabel X terhadap perubahan variabel Y . Uji R^2 merupakan angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dari fungsi tersebut. Nilai R^2 mempunyai sifat $0 \leq R^2 \leq 1$ dan apabila nilai R^2 semakin mendekati 1 semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau bisa dikatakan model semakin baik. Ciri-ciri regresi palsu (*spurious regression*) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki $R^2 > DW$ (Durbin-Watson).
2. Memiliki nilai signifikansi (t) tinggi.
3. Memiliki nilai DW (Durbin-Watson) rendah.

Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \mu_t \dots \dots \dots (3.5)$$

Jika x_t dan y_t adalah *random walk* dengan penyimpangan (*drift*) dan *trend* waktu ini tidak disertakan, masalah regresi *spurious* bahkan lebih buruk. Jika y_t adalah tidak stasioner dan setidaknya beberapa variabel penjelas adalah tidak stasioner, hasil regresi mungkin palsu (Gujarati, 2012).

Uji stasioneritas yang populer digunakan adalah *Unit Root Test*. Berbagai uji dapat dilakukan untuk memastikan adakah unit root dalam data. Dalam penelitian ini, uji unit root dilakukan dengan menggunakan uji *Phillips-Perron*. Uji PP ini merupakan pengembangan prosedur Dickey-Fuller dengan memperbolehkan asumsi adanya distribusi error (Gujarati, 2012).

Menurut Gujarati (2012), dalam Uji *Augmented Dickey-Fuller* digunakan asumsi adanya error yang homogen dan independen. Sebaliknya, uji PP ini dapat mengakomodasikan adanya error yang dependen dan terdistribusi secara heterogen (heteroskedastisitas). Dalam Uji ADF, lag harus ditentukan sebelumnya sehingga kesalahan dalam penggunaan lag akan mempengaruhi hasil pengujian. Sementara itu, dalam Uji PP kesalahan tersebut dapat dihindari karena besarnya lag telah ditentukan berdasarkan kisaran data. Selain itu, hasil dari uji ADF dapat memberikan hasil yang bias akibat tidak menolaknya adanya unit root. Hal tersebut dapat saja terjadi oleh karena adanya perubahan data akibat adanya guncangan (*shock*), dimana guncangan tersebut dapat mengubah data secara permanen. Dalam kasus ini, Uji PP memiliki tingkat pengujian yang lebih tepat.

Untuk memastikan apakah data stasioner atau tidak dengan menggunakan uji PP tidak berbeda dengan uji ADF. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

$H_0 : \delta = 0$, (ada *unit root – time series* tidak stasioner)

$H_a : \delta < 0$, (tidak ada *unit root – time series* stasioner)

Nilai PP *test statistic* dibandingkan dengan nilai kritisnya, baik 1 persen, 5 persen atau 10 persen. Jika t statistik > t kritis, maka H_0 yang menyatakan terdapat *unit root* atau *time series* tidak stasioner, dapat ditolak. Berarti *time series* tersebut stasioner. Selain itu, H_0 juga ditolak jika ρ -value kurang dari $\alpha = 1$ persen, $\alpha = 5$ persen, atau $\alpha = 10$ persen.

3.5.2 Penentuan Panjang Lag Optimal

Enders (2004) menyatakan bahwa sebelum melakukan uji kointegrasi perlu dilakukan penentuan panjang lag. Karena uji kointegrasi sangat peka terhadap panjang lag, maka penentuan lag yang optimal menjadi salah satu prosedur penting yang harus dilakukan dalam pembentukan model. Untuk memperoleh panjang lag optimal dalam estimasi model VAR/VECM dilakukan pemilihan panjang lag. Pemilihan panjang lag (ordo) optimal bertujuan untuk mendapatkan model yang tepat dalam estimasi. Lag yang terlalu sedikit akan berpotensi menimbulkan masalah bias spesifikasi sedangkan jumlah lag yang terlalu banyak akan menghabiskan *degree of freedom* sehingga estimasi menjadi tidak efisien. Cara pemilihan lag yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria informasi. Ariefianto (2012) menyatakan bahwa pemilihan lag dengan kriteria informasi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Estimasi VAR dengan menggunakan lag maksimum. Lag maksimum terikat dengan jumlah observasi (T) dan dapat dihitung dengan formula yang diberikan oleh Said dan Dickey (1984) dalam Ariefianto (2012), yakni $T^{1/3}$ (lag maksimum adalah akar tiga dari T).
2. Dengan demikian, lag optimal dapat dicari diantaranya dengan menggunakan *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwartz Information Criteria (SIC)*, dan *Hannan Quenn (HQ)*, *LR (Likelihood Ratio)*.
3. Nilai lag optimal dapat dilihat dari nilai statistik kriteria informasi yang dihitung bagi setiap lag. Lag optimal adalah lag dengan nilai statistik kriteria informasi yang terkecil.

Mengacu pada Gujarati dan Porter (2012) dan Enders (2004) maka perhitungan *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SIC), dan *Hannan-Quinn Information Criterion* (HQ) masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} AIC &= e^{2k/n} \frac{\sum \mu_t^2}{n} \\ &= e^{2k/n} \frac{RSS}{n} \dots\dots\dots(3.6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SIC &= e^{k/n} \frac{\sum \mu_t^2}{n} \\ &= e^{k/n} \frac{RSS}{n} \dots\dots\dots(3.7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} HQ &= e^{k/n} \frac{\sum \mu_t^2}{n} \\ &= \ln _ \ln \frac{k/n}{n} \frac{RSS}{n} \dots\dots\dots(3.8) \end{aligned}$$

Keterangan:

n	= jumlah observasi
k	= jumlah regresor termasuk <i>intercept</i>
ln AIC	= log natural AIC
$RSS / \frac{\sum \mu_t^2}{n}$	= jumlah residual kuadrat

3.5.3 Uji Koitegrasi

Kointegrasi merupakan kombinasi persamaan linier dari dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan jangka panjang. Enders (2004) menyatakan bahwa variabel-variabel yang berkointegrasi akan menjadi stasioner meskipun secara individu variabel-variabel tersebut tidak stasioner. Persamaan umum yang menyatakan bahwa dua atau lebih variabel akan menuju pada equilibrium jangka panjang jika :

$$\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n = 0 \dots \dots \dots (3.9)$$

Jika β adalah vektor $\beta_1 \beta_2 \beta_n$, sementara itu, x_t adalah vektor $x_1 x_2 x_n$ maka persamaan akan menuju pada equilibrium jangka panjang ketika :

$$\beta_t x_t = 0 \dots \dots \dots (3.10)$$

Uji kointegrasi dipopulerkan oleh Engle dan Granger (1987) dalam Enders (2004) menjelaskan komponen dari vektor akan berkointegrasi pada orde d , yang dinotasikan dengan $x_t \sim CI(d,b)$ jika :

1. Semua komponen dalam x_t terkointegrasi pada orde d .
2. Jika sebuah vector $\beta = \beta_1 \beta_2 \beta_n$ yang merupakan kombinasi linier dalam $\beta_{x_t} = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \dots + \beta_n x_{nt}$ akan berterkointegrasi pada order ketika $(d - b)$ ketika $b > 0$. Notasi β merupakan vektor kointegrasi.

Menurut Engle dan Granger (1987) dalam Gujarati (2012), kointegrasi berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi seperti yang disyaratkan oleh teori ekonomi. Kointegrasi dapat pula dipandang sebagai uji teori dan merupakan bagian yang penting dalam perumusan dan estimasi suatu model dinamis. Dalam konsep kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktu tidak stasioner akan terkointegrasi bila kombinasinya juga linier sejalan dengan berjalannya waktu, meskipun bisa terjadi masing-masing variabelnya bersifat tidak stasioner. Bila variabel runtun waktu tersebut terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Akan tetapi, Lee dan Granger (1990) dalam Enders (2004) menyatakan

masih memungkinkan untuk mendapatkan equilibrium antar variabel yang terkointegrasi dengan order yang tidak sama. Proses ini disebut sebagai multikointegrasi.

Thomas (1998) menjelaskan bahwa jika terdapat dua atau lebih variabel yang stasioner pada orde yang berbeda maka variabel-variabel tersebut akan terkointegrasi pada orde dari variabel yang lebih tinggi (d). Hal ini terjadi karena variabel non stasioner akan mendominasi variabel yang stasioner. Jika dalam persamaan terdapat dua variabel $x_t = \alpha + \beta y_t$, dengan α dan β adalah konstan, maka jika y_t non stasioner maka x_t juga menjadi non stasioner. Jika z_t adalah jumlah dari variabel x_t dan y_t dan jika diasumsikan y_t terkointegrasi pada orde kedua (I) dan x_t terkointegrasi pada orde pertama (0) maka kedua variabel akan terkointegrasi pada *first difference*(I).

$$\Delta z_t = \alpha \Delta x_t + \beta \Delta y_t \dots \dots \dots (3.11)$$

Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Johansen-Juselius. Uji kointegrasi Johansen-Juselius digunakan untuk menguji *Vector Error Correction Model*(VECM). Dalam kointegrasi Johansen-Juselius jika nilai *trace statistic* dari uji kointegrasi lebih besar daripada *critical value* 1, 5, dan 10 persen maka persamaan tersebut terkointegrasi.